



# Newsletter

# Interfidei

Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia

## Daftar Isi

Editorial .....	1
Fokus .....	2
Opini .....	6
Fitur .....	18
Kronik .....	21
Refleksi .....	26
Agenda .....	32

### Penanggung Jawab

Elga Sarapung

### Pemimpin Redaksi

Wiwin Siti Aminah

### Tim Redaksi

Elga Sarapung, Nur Izzah,  
Millati, Wiwin Siti Aminah

### Setting/ Layout

Sarnuji

### Dokumentasi

Margareta E. Widyaningrum

### Keuangan

Eko Putro Mardianto,  
Fita Andriani

### Diterbitkan oleh

Institut DIAN/ Interfidei  
Jl. Banteng Utama 59,  
Perum Banteng Baru  
Yogyakarta, 55581, Indonesia.  
Phone.:0274-880149.  
Fax.:0274-887864

### E-mail

dianinterfidei@yahoo.com

### Website

<http://www.interfidei.or.id>

## Editorial

**K**ali ini, terbitan Newsletter reguler Interfidei untuk seri II tahun 2012, berfokus pada soal hubungan intra-agama. Kami sadar bahwa hubungan INTRA-AGAMA sama penting dengan hubungan ANTAR-AGAMA dalam konstelasi dinamika pluralitas agama, keagamaan dan keyakinan di Indonesia. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir ini, ketegangan, bahkan kekerasan yang merusak relasi-relasi kemanusiaan di dalam lingkungan intra-agama menjadi semakin fenomenal. Tak pelak lagi, bahkan sampai pada mengakibatkan sesama warga masyarakat, sesama manusia yang menganut agama sama dengan aliran berbeda terpaksa harus menjadi korban, terbunuh-mati. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai serta pesan-pesan keagamaan dari agama mana pun. Dalam kehidupan berbangsa pun, ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hubungan-hubungan, apa pun bentuknya, dikarenakan oleh berbagai perbedaan, menjadi penting untuk dibangun, dikembangkan, termasuk perbedaan intra dan antar-agama dan keyakinan. Cara yang paling ideal adalah dengan menghidupkan dan mengembangkan dialog. Dialog di antara yang berbeda, tentang yang berbeda, untuk yang berbeda, tetapi dengan satu tujuan, yaitu membangun hidup bersama sebagai sebuah bangsa yang adil, beradab, damai.

Bagaimanapun, mengenai perbedaan intra-agama merupakan kenyataan yang sedang tersebar di mana-mana di hampir seluruh pelosok Indonesia. Fakta yang tidak bisa dihindari lagi, tetapi tidak bisa juga dibiarkan meluas ke mana-mana tanpa sebuah etika bersama, bagaimana hidup di dalam masyarakat majemuk, di dalam sebuah bangsa yang memiliki Konstitusi.

Dalam Newsletter ini, Anda akan membaca hal-hal yang dimaksudkan, baik dalam fokus, opini maupun refleksi. Sebagai profil, kami menampilkan "wajah" Institut Mosintuwu yang berkedudukan di Tentena, Poso. Selain itu, kami menyampaikan beberapa kegiatan yang dilakukan Interfidei bersama dengan "keluarga besarnya", jaringan, teman-teman, sahabat, baik yang ada di Yogyakarta maupun di beberapa daerah lain.

Selamat membaca dan tetap semangat dalam perjuangan bersama!

Team Redaksi/Penerbit

**T**his edition of regular Interfidei's Newsletter edition II of 2012 is focused on intra-religious relationship. We are aware that this INTRA-RELIGIOUS relationship is as important as INTER-RELIGIOUS relationship within any constellation of dynamics of religious, religiosity, and faith in Indonesia. Moreover, within the last few years, tension, even violence damaging humanitarian relations in intra-religion environment has become more phenomenal. Undeniably, it has even caused fellow members of community, of fellow human being of the same religion but with different denomination, become victims, murdered-dead. It is of course against the values or religious teachings of any religion. In the life of this very nation, it is also against Pancasila (The Five Principles of Indonesia) and UUD (Basic Constitution) 1945.

Relationships, in whatever forms, initiated by various differences, are important to be built and developed, including intra-religious and inter-religious/faith differences. The most ideal way is by bringing into life and developing dialogs: dialogs between and for the different, but with one objective: building a collective life as a just, civilized, and peaceful nation.

Nevertheless, intra-religious differences are a fact existing across all Indonesia. It is an inevitable fact, but is also one that cannot be ignored to spread all over the country without any collective ethics for how life is in a plural community, in a nation with a Constitution.

In this Newsletter, you could read the aforementioned issues, whether in the Focus, Opinion, or Reflection. In the Profile section, we gladly present the "face" of Mosintuwu Institute located at Tentena, Poso. In addition, we would also like to report a number of activities implemented by Interfidei together with our "big family": our network, colleagues and friends, in Yogyakarta or in other areas.

Happy reading and stay spirited in our fight together!

Editor/Publisher Team

## **Dialog Intra Agama: Membangun Kedewasaan Beragama**

Oleh: Noorhalis Majid\*

**K**onflik internal agama nampaknya tidak semakin surut. Selalu saja berulang di berbagai tempat. Bahkan hingga kini, kasus Ahmadiyah dan Syi'ah, dalam agama Islam di Indonesia, misalnya, masih menyisakan persoalan kemanusiaan serta hak-hak sebagai warga negara. Hak hidup para pengungsi yang terusir dari kampungnya, tidak mendapat perhatian yang sewajarnya oleh negara, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai manusia.

Berbeda pemahaman dan praktik keagamaan di internal agama bukanlah hal baru. Sejak dulu perbedaan itu ada di dalam semua agama. Tentu masih kuat dalam ingatan kita, khilafiah yang abadi antara NU dan Muhammadiyah. Bahkan keluarga kami punya pengalaman soal khilafiyah ini. Tahun 60-an, ketika kakek saya mendirikan Muhammadiyah di Amuntai (Hulu Sungai Utara Kalsel), orang-orang yang menganggap Muhammadiyah sebagai ajaran keagamaan yang sesat dan menyesatkan melempari rumah kakek saya. Bedanya saat itu belum ada fatwa MUI yang memberi label sesat atau tidak sesat.

Demikian halnya ketika pertama kali kakek dan jamaah Muhammadiyah melakukan sholat hari raya di tanah lapang, muncul pendapat dan tuduhan bahwa itu menyimpang dari ajaran Islam. Kasus itu kemudian diselesaikan oleh pemerintah melalui dialog dengan mengundang para pihak.

Di Alabio, tidak jauh dari Kota Amuntai, pertentangannya lebih sengit lagi. Bahkan jembatan yang biasa dilewati warga masyarakat, tidak boleh dilewati warga Muhammadiyah. Akhirnya dibangun

## **Intra-religious Dialogue: Building Religious Maturity**

By: Noorhalis Majid\*



**R**eligious internal conflict appears to not lose its tides. It occurs over time in various places. Even now, for example, the case of Ahmadiyah and Shi'a in Islam religion across Indonesia leaves problems on humanity issue and citizen's rights. It leaves behind the right to live from the exiled residents, who does not well appreciated by the state in terms of their beings as citizens and human beings.

The difference upon understanding and practice in a religion is not a new thing for us. Ever since long time ago, difference lives up in every religion. Surely it is well-remembered, the eternal khilafiah between NU and Muhammadiyah. Even my family has a specific experience about this khilafiyah. In the 60's, right when my grandfather set

\*Pendiri Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3), Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

\* Founder of Institute for Islamic and Social Studies (LK3) Banjarmasin, South Kalimantan

lagi jembatan di sampingnya agar tidak menimbulkan konflik terbuka.

Hal-hal menggelikan seputar cerita khilafiyah ini tentu juga ditemukan di banyak tempat. Hingga kini, perbedaan itu tetap ada. Tapi tidak pernah lagi menjadi konflik terbuka yang berpotensi pada kekerasan dan tindakan anarkis. Sebabnya bisa jadi karena Muhammadiyah sudah semakin besar, atau bisa pula karena sudah saling memahami satu dengan lainnya. Tapi bahwa masih banyak yang tidak mau sholat di Masjid Muhammadiyah, dan sebaliknya juga orang Muhammadiyah enggan sholat di Masjid yang bukan Muhammadiyah, adalah kenyataan khilafiyah yang tidak bisa dihindari.

Minoritas selalu menjadi sasaran diskriminasi, dan intoleransi terjadi karena komposisinya sudah berimbang atau bahkan sudah mayoritas. Nampaknya logika minoritas - mayoritas lah yang menentukan apakah diskriminasi atau toleransi. Padahal logika ini adalah logika politik, logika kekuasaan. Logika agama semestinya melindungi yang kecil, lemah lagi teraniaya.

Sekarang ini di internal Islam sudah sangat banyak aliran, hingga sulit menyebutnya satu persatu. Dalam tubuh NU dan Muhammadiyah sendiri terdapat berbagai warna, mulai dari tradisional, salafi, wahabi, moderat, abangan dan bahkan yang liberal. Belum lagi di luar semua itu, kehadiran Syi'ah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Aliran dan kelompok ini memiliki pemikiran dan praktik beragama yang berbeda. Termasuk praktik menyangkut simbol-simbol keagamaan yang menjadi identitas dalam beragama. Aliran baru yang datang dari berbagai negara, bukan saja membawa praktik keagamaan, namun juga referensi, cara pandang hingga ideologi.

Semua perkembangan itu terjadi karena agama bagian dari globalisasi. Tidak bisa dihindarkan bahwa mobilisasi orang juga berdampak pada mobilisasi agama, keyakinan, pemikiran, kebudayaan hingga ideologi. Karena itu tidak mungkin menolak perkembangan dan perubahan-perubahan yang sangat cepat akibat globalisasi. Yang

up Muhammadiyah in Amuntai (at the northern upstream of South Borneo), people considered Muhammadiyah as an astray teaching and came to assault my grandfather's residence. At that time, there wasn't yet any Indonesian Ulema Council's fatwa, labeling that a teaching is astray or not.

Similar thing occurred when my grandfather and the people of Muhammadiyah conducted mass prayer in the field. Some arguments rose up to accuse that it had deviated from Islamic teaching. The case was then solved with the intervention of local government in a dialogue involving all the communities.

In Alabio, not far from Amuntai city, the quarrels went even more radical. A bridge was even forbidden for Muhammadiyah's people. It ended up that another bridge was built next to it to avoid any open conflict.

Uncanny stories about khilafiyah are found in many places. Even today, we can still find differences. Thank God it now never turns out into an open conflict that leads to violence and anarchy. It is probably because Muhammadiyah has grown into a bigger group, or that people begin to understand each other. However, the fact is that there are still many non-Muhammadiyah who refuse to pray in Muhammadiyah's mosque - and vice versa, this is an inevitable fact of khilafiyah.

Minority is always a target of discrimination, and that intolerance happens when the composition is balance or becoming majority. It appears that the minority - majority logic defines whether a thing results in discrimination or tolerance. In fact, this is a political logic, a ruler's logic. Religious logic is supposed to protect the small and marginalized.

Internally in Islam, there have been various streams that make it difficult to mention one-by-one. Even within NU and Muhammadiyah, there are various colors, starting from traditional, salafi, wahabi, moderate, abangan and even liberal. Not to mention, the existence of Shi'a, Ahmadiyah and many more. The stream and the group possess distinctive thoughts and religious practice. That

bisa dilakukan adalah memperkuat keimanan atas agama dan keyakinannya masing-masing, menjadikannya identitas dalam berinteraksi serta berdialog.

Kalau aliran-aliran itu memang bersumber dari agama, maka tentu yang muncul adalah kebaikan serta nilai luhur agama, yang kemudian bertemu satu dengan lainnya menjadi nilai-nilai universal yang diakui oleh semua aliran dan agama. Sebagaimana kita ketahui, nilai-nilai universal agama itu antara lain: kebenaran; anti kekerasan; keadilan; kesetaraan; cinta (bukan menguasai); kasih sayang (lahir dari kualitas spiritual); toleransi (menjunjung tinggi martabat dan kasih sayang). Kalau nilai universal ini yang ditonjolkan maka apapun aliran dan agamanya tidak akan pernah menjadi persoalan.

Harus disadari bahwa sekalipun agamanya sama, namun bila berada di tempat yang berbeda maka ekspresi atas agama tersebut akan berbeda pula. Karena agama memberi dampak terhadap budaya dan budaya juga memberi pengaruh pada agama. Demikian halnya dengan tingkat pemahaman, pemikiran dan berbagai informasi, saling memberi pengaruh. Karena itu, jangan heran bila agama yang sama sekalipun, diekspresikan berbeda di tempat yang berbeda. Dan ketika ekspresi itu bertemu satu dengan lainnya maka muncullah penolakan dan klaim kebenaran.

Diakui bahwa, perbedaan itu nyata. Tetapi, sebaiknya yang ditonjolkan bukanlah perbedaan, namun titik temu persamaan. Semua itu hanya bisa dilakukan bila ada kelapangan dalam menerima perbedaan dan mengakui serta menghargai tentang perbedaan. Cak Nur mengatakan, “optimisme terhadap kenyataan perbedaan itulah yang disebut PLURALISME”.

Agar tidak terjadi pertentangan, banyak yang menganjurkan untuk mengembangkan agama sipil atau agama publik. Yaitu agama yang hidup di masyarakat atau di ruang publik, menjawab persoalan masyarakat dan persoalan publik. Sesungguhnya agama seperti itu yang diharapkan masyarakat. Agama yang hadir di tengah orang miskin, di IGD Rumah Sakit, di tengah korban

includes a practice that relates to religious symbol which becomes religious identity. New streams come from different nations. They, not only bring about religious practice, but also carry reference, perspective and ideology.

All of this develops following the globalization of religion. It is inevitable that mobilization impacts religion, faith, thought, culture and even ideology. Therefore, it is almost impossible to refuse development and changes that occur rapidly due to globalization. What is left to do is to strengthen faith upon religion and making it the identity at interacting and making dialogue.

If the streams indeed come from the religion itself, then what follows is the value of goodness and universal – which are acknowledged by all streams and religions. As we know, the universal values of

**Peran pemuka agama menjadi sangat strategis dalam mewujudkan agama sipil atau agama publik tersebut, dengan membangun dialog, termasuk dialog intra agama.**

religion are: truth, non-violence, justice, equality, love (not ruling), passion (from spiritual quality) and tolerance (upholding dignity and love). If these universal values are put forward, whatever the stream and religion will not matter.

We must come to realize that even within the same religion, when it comes to different place, then the expression of the religion will differ. It is because religion impacts culture as culture impacts religion. It is the same thing as understanding, thought and information that affect each other. Therefore, no wonder if religion is expressed differently in different places. As when those expressions meet up in one occasion, there must be rejection and truth claim.

It is true that difference is real. On the contrary,



bencana alam, di tempat pengungsian, dan di banyak tempat yang membutuhkan pertolongan dan solidaritas.

Peran pemuka agama menjadi sangat strategis dalam mewujudkan agama sipil atau agama publik tersebut, dengan membangun dialog, termasuk dialog intra agama. Para pemuka agama, terutama pemuka agama yang duduk dalam majelis agama-agama, mengedepankan dialog untuk menjawab berbagai persoalan intra agama. Tidak cepat menghakimi atau memberi stigma tertentu. Tanpa dialog, hanya akan mendatangkan kekerasan atau diskriminasi.

Sementara itu, negara harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga masyarakat. Menjamin bahwa beragama merupakan hak dasar yang dilindungi oleh negara. Tidak boleh ada pengingkaran atau pengabaian atas hak dasar ini. Pengingkaran dalam bentuk peraturan, kebijakan ataupun tindakan terhadap setiap warga negara. Negara harus hadir dan bertindak tegas dalam setiap persoalan yang mengingkari hak dasar ini.

Kontrol masyarakat terhadap peran negara dalam melindungi hak setiap warga negara adalah bentuk demokrasi yang harus terus dibangun. Kontrol tersebut dalam bentuk mengkritisi setiap kebijakan yang dilahirkan negara, termasuk praktik dan tindakan siapapun yang berimplikasi pada hubungan internal dan eksternal agama. Memastikan bahwa negara harus netral. Melindungi segenap anak bangsa dan menjamin kebebasan menjalankan agama dan keyakinannya.

Demokrasi dan agama sipil, adalah dua hal yang harus terus dikembangkan. Caranya dengan melakukan dialog, agar terbangun kedewasaan dalam beragama. Betul kata Gus Dur, “agama tidak perlu dibela”, yang perlu dibela adalah masyarakatnya. Kalau atas nama agama lalu menindas masyarakat, maka pasti dia bukan agama. Agama hadir justru untuk membela masyarakat, membela kaum tertindas. Agama berfungsi memperbaiki tatanan kehidupan agar berbudaya dan berperadaban.★

it is not the difference that we should point out but the meeting point and similarity. It is only possible when there is a willingness to accept and admit difference. Cak Nur once said, “Optimism towards difference is PLURALISM”

To avoid clash, many recommend that civil and public religion to be developed. It is religion that lives in the society or public, as to answer the issue in both parties. Truly, it is the religion that people expect, religion that lives for the poor, in the ER, in disaster, in refugee center, and in many places that need help and solidarity.

The role of religious leaders then become strategic on manifesting civil and public religion by constructing dialogue, including the internal one. Religious leaders, especially those sitting at the counsel, should put forward the dialogue to discuss various internal issues. They should not come into quick conclusion or stigmatize. Without dialogue, all that remains is violence and discrimination.

Meanwhile, a nation should secure freedom on religion for every citizen. Freedom upon religion is a basic right that a nation should protect. It should not be neglected or left behind in forms of rules, policy or action. In short, state must be present and strict on solving every issue concerning this particular right.

Public control towards the role of nation on protecting the rights of citizen is a from of democracy that must be continuously built. It can be in the form of criticizing every policy that the nation produces, including its practice that implies on the internal and external relation of religion. It is essential that the nation should be neutral to protect and secure freedom of its citizen, especially in religion and beliefs.

Democracy and civil religion are two things that need to be continuously developed. It is by keep constructing dialogue, to build religious maturity. Gus Dur once said, “Religion needs no defense”, it is the people that need one. Religion must not oppress people. Religion lives to defend people and the oppressed. It functions to fix the life sphere into a civilized one.★

## **“Ecumenical Dialogue & Ecumenical in Action”: Entry Point bagi sinergisitas Interdenominasi**

**(Menyorot keberagaman wajah  
Kekristenan di Indonesia)**

Oleh: Olvi Prihutami<sup>1</sup>

### 1. “Keberagaman” dalam “keberagamaan” sebagai Identitas Kita

Sejatinya, salah satu identitas hakiki bangsa Indonesia adalah 'keanekaragaman'. Fakta yang lugas walaupun banyak dikebas dengan beringas oleh orang-orang yang tidak menghargai identitas keragaman di bumi pertiwi ini, dibuktikan secara tegas dalam setiap aspek dan lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali dalam wajah keberagamaan kita. Aspek hidup manusia yang merepresentasikan bakti kepada yang Ilahi muncul dalam wajah kemajemukan dengan varian doktrin/ajaran maupun praksis liturgi, dan implementasi muara etikanya.

Namun, berdasarkan pengalaman nyata para penganutnya (tak terkecuali penulis), agama dapat hadir dengan dua wajah sekaligus, wajah yang lembut tetapi juga wajah yang garang. Penebar kasih dan kepedulian, namun di sisi lain penyulut konflik dan perpecahan. Sisi garang itu, tentu bukanlah bagian dari ideologi awal nilai-nilai keberagamaan. Namun toh sejarah membuktikan wajah 'kegarangan' agama terjadi, bahkan dapat dikatakan nyaris di sepanjang masa dan peradaban. Yaitu ketika agama mulai dikenal sebagai bagian dari aspek kehidupan manusia.

Dalam konteks Bangsa Indonesia, kita sudah cukup lelah dengan karut marut konflik mengatasnamakan agama. Banyak pihak menggagas

<sup>1</sup> Sekretaris Eksekutif Bidang Koinonia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

## **“Ecumenical Dialogue & Ecumenical in Action”: Entry Point to Interdenominational Synergy**

**(Spotting Christian Diversity in Indonesia)**

By: Olvi Prihutami<sup>1</sup>



### 1. “Diversity” in “Diversity” as Our Identity

Essentially, one identity of Indonesian is diversity. This is a plain fact that is mostly castrated in a brute way by those having no respect to diverse identity in Indonesia. It can be seen obviously in almost all sectors of life in the nation, not to mention in the very face of our diversity. A life aspect that represents divine dedication turns out to appear in the face of plurality with the variety of doctrine or teaching of liturgy practice and its implementation.

However, according to the real experience of the followers (including the writer), religion could be present in two faces at the same time, the gentle and

<sup>1</sup> Executive Secretary of Koinonia's Division of Communion of Churches in Indonesia (PGI)

upaya dialog dan perdamaian, mencoba menghembuskan kesejatan, kemurnian dan keluhuran pengajaran iman. Walau jujur... banyak trial and error, upaya-upaya ini tak kenal putus asa dikerjakan oleh para pihak yang peduli, toleran, tidak egois, inklusif dan pluralis.

## 2. Keberagaman Interdenominasi sebagai wajah Kekristenan di Indonesia

Melalui artikel ini, penulis menghantar pembaca sejenak menyelami seluk beluk keragaman, potensi konflik dan dialog yang bergeliat di salah satu ekspresi iman anak-anak bangsa, yaitu dinamika keberagaman dalam kekristenan. Sama dengan keberadaan saudara-saudara kita Muslim dengan heterogenitas alirannya, maka dalam Kekristenan pun tidak kalah heterogenitas yang ada. Sejarah gereja yang telah dimulai dengan perpisahan dua mazhab besar, "Kristen Katolik" dan "Kristen Protestan", hanya merupakan cikal bakal dari berkembang biaknya 'pohon keragaman' dalam mazhab keluarga besar kekristenan itu. Dewasa ini tak kurang dari delapan poros besar aliran, sebut saja: Katolik, Protestan, Ortodoks, Injili, Pentakosta-Karismatik, Bala Keselamatan, Adven Hari Ketujuh, dan Baptis. Dari setiap poros ini, masih berkembang pula berbagai varian dengan bermacam ajaran dan tradisi. Kembali pada kesejatan wajah agama, dalam internal relationship kekristenan ini, tak jarang muncul ekspresi 'kasih' dan 'kegarangan' sebagai suatu realitas yang paradoks. Perbedaan-perbedaan terkait 1). ajaran, 2). bentuk dan ekspresi peribadatan, 3). pegangan etis dan 4). tata gereja, terkadang (sering?) menimbulkan gesekan di lapangan, gesekan di antara umat, kesalahpahaman dan kecurigaan. Walaupun di masa sekarang, tidak juga dapat dikatakan timbul gesekan besar yang berpotensi menelan korban, namun awal sejarah kekristenan dunia misalnya harus mengakui fakta sudah tercorengnya sejarah dengan konflik berdarah akibat kecurigaan antara penganut Protestan dan Katolik di masa lampau.

Merujuk pada pengalaman praktis penulis berinteraksi dalam pergaulan interdenominasi, khususnya pengalaman perjumpaan gereja-gereja

brute. At one side it is the loving and care face, but on the other hand it is the harbinger of conflict and separation. Indeed the brute face is not a part of the original ideology of religious value. Yet, history proves that brutality in religion occurs throughout the history and civilization. It is when religion was identified as a part of life aspect.

In the context of Indonesia, we have had enough of conflicts under the name of religion. Many have proposed the effort on dialogue and peace. They try to spread the essential, pure and sacred religious teachings. Though frankly, through trial and error, these efforts are made by those who relentlessly care, having the attitude of tolerant, not selfish, inclusive and pluralist.

## 2. Interdenominational Diversity as The Image of Christianity in Indonesia

Through this article, the writer delivers the readers to once dig into diversity with the conflict potential and dialogue that swirl within the dynamic of youths – the dynamic of diversity in Christianity. Sharing similarity with our Moslem friends with their heterogeneity, Christians also possesses heterogeneity. The history of church began with two great streams, Catholic and Protestant. Yet, they are only the roots of 'diversity tree' in the stream of Christianity. Today, there are at least eight axis of stream, namely: Catholic, Protestant, Orthodox, Biblical, Pentecost – Charismatic, Seventh-Day of Advent and Baptism. From this entire axis, there are teachings and tradition developing in various ways. Again, within the internal relationship of Christianity, the expression 'passion' and 'brutality' is a paradox reality. The differences then relate to 1.) teaching, 2.) the form of liturgy, 3.) ethical stance, 4.) church conduct. They (often?) cause ripples in reality, among the followers, in terms of misconception and suspicion. Though at the moment there is no big ripple that has the potency to

Protestan (mainstream/tradisionil)<sup>2</sup> dengan saudara-saudara dari Pentakosta-Karismatik<sup>3</sup>, misalnya, maka beberapa faktor konflik muncul karena fenomena yang terjadi seperti:

### Faktor Konflik<sup>4</sup> (mengangkat tiga faktor yang menonjol)

#### 2.1 Mobilitas warga dari gereja satu ke gereja lainnya

Salah satu pokok masalah antara gereja-gereja Protestan (mainstream/tradisionil) dengan saudara-saudara dari Pentakosta-Karismatik terungkap dalam tuduhan kepada kalangan gereja-gereja Pentakosta - Karismatik "mencuri domba" atau "menjala di kolam tetangga". Sering terjadi bahwa warga dari gereja-gereja mainstream/tradisional berpindah, atau lebih sering pergi beribadah ke gereja-gereja Pentakosta-Karismatik. Maka jumlah warga gereja Protestan (mainstream/tradisionil) terus berkurang sementara warga gereja-gereja Pentakosta-Karismatik terus bertambah. Pihak gereja-gereja Pentakosta-Karismatik menyatakan bahwa benar ada mobilitas warga gereja dari gereja-gereja tetangganya, yang mana dalam berbagai kasus, warga jemaat yang dengan kemauan sendiri pergi ke gereja-gereja Pentakosta-Karismatik, karena menginginkan pelayanan yang lebih baik, mengikuti ungkapan "rumput tetangga lebih hijau". Tak jarang perpindahan terjadi karena yang bersangkutan terlibat konflik di dalam gereja asalnya. Dalam kasus-kasus seperti ini semua pihak pasrah mengikuti hukum pasar, konsumen membeli apa yang dia kehendaki; atau membangun komitmen untuk "mengembalikan domba-domba terlantar" yang sempat dilayani.

<sup>2</sup> Istilah Mainstream yang dipakai di sini, kiranya tidak semata-mata mengacu pada komposisi jumlah penganut, melainkan lebih kepada sumber atau poros awal peta dan tradisi kekristenan di dunia dan Indonesia. Karena itu kadang disebut juga Gereja tradisional.

<sup>3</sup> Dalam perjumpaan interdenominasi, fenomena yang sering disorot adalah perjumpaan antara gereja-gereja bercorak tradisional, yang lebih dikenal dengan istilah Mainstream (dalam mazhab Lutheran, Calvinis, misalnya) dengan gereja/gerakan Pentakosta-Karismatik. Perbedaan tradisi, dan juga beberapa pokok ajaran serta ekspresi ibadah dan pengejawantahan misi memang sangat mencolok antara dua tradisi ini.

<sup>4</sup> Identifikasi faktor konflik yang muncul dalam Dialog Teologi antara Gereja-Gereja Mitra PKN (gereja-gereja Mainstream/Tradisionil) dengan gereja-gereja gerakan Pentakosta-Karismatik, Jakarta, 25-28 September 2012.

result in casualty, still the early history of Christianity must admit the fact that bloody conflict occurred due to suspicion between Protestant and Catholic followers.

Referring to the practical experience of the writer in the interdenominational relation, especially upon the meeting of Protestant churches (mainstream/tradisional)<sup>2</sup> with the fellow Pentecost – Charismatic<sup>3</sup> for example, then a few conflict factors appear due to the following phenomena:

### Conflict Factors<sup>4</sup> (the rising 3 substantial factors)

#### 2.1 Residents' mobility from a church to another

An essential issue among protestant (mainstream / traditional) churches with the fellow Pentecost – Charismatic churches is revealed with the accusation that the Pentecost – Charismatic churches tries to "steal followers". What often happens is that people from mainstream / traditional churches move to Pentecost – Charismatic churches to their prayer. Whilst the number of followers in Protestant (mainstream / traditional) churches reduces, the number of followers in Pentecost – Charismatic churches increase. Pentecost-Charismatic churches themselves stated that indeed there has been a mobility of fellow Christians from other churches, in which they move of their own willingness for wanting a better religious service as the grass next-door is surely greener. Mostly, the

<sup>2</sup> Mainstream in this case means not only to refer to the composition of of the followers, but also to the source or the map axis and tradition of Christianity in the world and Indonesia. Therefore, sometime it is called as "traditional church".

<sup>3</sup> In interdenomination, the highlighted phenomenon is the meeting of traditional churches, known with the term as Mainstream (Luther, Calvin, etc.), with the Pentecost-Charismatic churches or movements. Tradition diversity and various teaching as well as religious expression on manifesting the mission are indeed distinctive.

<sup>4</sup> Conflict factor identification as appears in Theology Dialogue among Partner Churches of The Protestant Churches in Netherlands/PKN (Mainstream/Traditional Churches) with Pentecost – Charismatic churches and movements, Jakarta, 25-28 September 2012.



## 2.2. Saling menghakimi (menganggap yang lain / yang berbeda sebagai kelompok sesat)

Saling menjelek-jelekkan sering juga terjadi antara gereja-gereja Protestan (mainstream/tradisional) dengan gereja-gereja Pentakosta-Karismatik. Latar belakang sikap ini adalah perpecahan dalam gereja. Sejarah munculnya denominasi sering disertai perbedaan doktrin atau bentuk-bentuk pelayanan antara kedua pihak. Maka yang kedua pihak saling menghakimi dengan menganggap yang satu mengembangkan ajaran yang salah/sesat, atau praktek-praktek pelayanan yang menyimpang. Beberapa pokok ajaran atau praktek ibadah atau pelayanan dalam gereja-gereja Pentakosta-Karismatik dianggap sesat atau menyimpang oleh gereja-gereja mainstream/tradisional. Sebaliknya, dalam kehidupan dan peribadahan

gereja-gereja mainstream/tradisional, Roh Kudus dianggap tidak hadir dan bekerja. Namun yang paling sering menjadi ganjalan adalah pandangan dan praktek

baptisan yang berbeda. Umumnya gereja-gereja Pentakosta-Karismatik menganggap bahwa umat dari Gereja mainstream/tradisional perlu dibaptis ulang karena baptisan yang telah dilakukan belum dipenuhi oleh Roh Kudus, karena itu, kekristenan gereja mainstream/tradisional dianggap “belum benar”.

## 2.3. Penerjemahan Pelaksanaan Misi di tengah masyarakat Majemuk

Perbedaan penerjemahan pelaksanaan Misi gereja di tengah-tengah masyarakat majemuk juga menjadi pemicu kerenggangan hubungan antara dua tradisi. Gereja Mainstream/tradisional dengan pengejawantahan dari teologi sosial yang lebih inklusif, sering memandang saudara-saudaranya dari Pentakosta-Karismatik menjalankan misi yang

movement occurs since they originally had some conflicts in the prior church. In such case, all should return to the market principle saying: “consumers buy everything they want”, or simply build the commitment to return 'the lost sheep' once served.

## 2.2. Judgmental (considering the rest as the misleading ones)

Attempts to take down one another also occur between Protestant (mainstream / traditional) churches with Pentecost – Charismatic churches. The difference in stance is its main cause. The history of denomination is often followed with doctrine or service differences. Thus, both churches start to judge and consider one another with spreading the

misleading teaching or practice of service. Some core teachings or practices of service in Pentecost – Charismatic churches are considered

**Dalam ecumenical dialogue kalangan interdenominasi bisa berdiskusi secara khusus tentang pokok-pokok teologis (yang mungkin selama ini cenderung dihindari – untuk dibicarakan, baik keunikan dan bahkan perbedaan-perbedaannya), khususnya terkait wawasan oikumene dan perbedaan doktrin yang ada di dalam “keluarga Kristen”. Prinsip dan semangat “belajar dari satu sama lain” diberlakukan, dimana dalam proses dialog itu masing-masing tetap membawa identitas sejati dari tradisi dan doktrin untuk didialogkan secara terbuka.**

to be misleading by the mainstream / traditional churches. On the contrary, the life and service of mainstream / traditional churches / traditional are considered to be lack of the presence of Holy Spirit. However, what mostly becomes an issue is the different view and practice baptism. Commonly, Pentecost – Charismatic churches consider that the people from mainstream / traditional churches must be baptized again since their baptism is not yet filled with Holy Spirit. Thus, Christianity in the mainstream / traditional churches is not yet 'correct'.

## 2.3. Translating Mission's Administration in the Middle of Plural Society

berakar pada fundamentalisme agama yang cenderung kontraproduktif terhadap upaya hidup dalam keberagaman lintas iman. Di sisi lain muncul penilaian sebaliknya bahwa Gereja mainstream/tradisional dipandang tidak progresif dalam menjalankan misi dalam pengertian tradisional dan eksklusif. Kenyataannya, sering kali penilaian ini berangkat dari fenomena yang ada dan bukan dari interaksi intensif kedua belah pihak. Tidak saling mengerti, tidak saling memahami, namun saling menilai.

Saling menjelekkkan antara gereja-gereja menjadi kendala bagi pekabaran Injil. Seorang sejarawan Asia menyatakan bahwa kegagalan agama Kristen di Asia karena gereja-gereja sibuk mengkhotbahkan kesalahan gereja-gereja lain.

Fakta di atas hanyalah beberapa contoh dari keanekaragaman internal kekristenan yang berpotensi (atau malah sudah menimbulkan) konflik. Memang seringkali konflik ini tidak muncul ke permukaan secara konfrontatif dan demonstratif. Namun lebih menjadi semacam mainset yang dibangun lintas generasi, sehingga terjadi atmosfer relasi yang saling mencurigai dengan berbagai stereotype yang dikembangkan di pihak masing-masing.

### **3. Mengembangkan Ecumenical Dialogue – Entry Point membangun Kebersamaan dalam Keragaman Denominasi**

Dengan semangat dialog lintas iman yang terus berkembang, maka tidak bisa tidak kekristenan sendiri juga perlu berbenah diri, berkaca dan memulai proses dialog yang produktif dan konstruktif dalam lingkungan internal interdenominasi. Sangat disadari, kebuntuan komunikasi dan ketidaksepahaman dalam banyak hal menghambat kekristenan di Indonesia berkontribusi positif bagi situasi dan pergumulan bangsa, oleh karena sibuk dengan dirinya sendiri dengan berbagai konflik Internal. Dalam pada ini, Gerakan Oikumene sebagai simbol kesatuan gerak langkah gereja menjadi sebuah wacana yang terus digemakan<sup>5</sup>. Paling tidak ecumenical movement

<sup>5</sup> Misalnya, Wacana gerakan keesaan dalam format gerakan oikumene sudah lama menjadi agenda yang selalu digemakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), sebuah organisasi payung gereja yang menaungi 88 sinode gereja dari seluruh Indonesia.

The different interpretation of church mission administration in the plural society could also trigger the tension between two traditions. Mainstream / traditional church, with the inclusive social theology, often views the fellow Christians from Pentecost – Charismatic carrying on the mission of religious fundamentalism that tends to be counter-productive to the attempts of life in interfaith diversity. On the other hand, mainstream / traditional church is often seen to be not progressive in carrying on the mission in terms of being traditional and exclusive. The fact is, often these judgments come from the existing phenomena and not a live interaction from both sides – no understanding, but judging.

Taking down one another among churches is indeed a trouble for biblical world. An Asian history expert once stated that the failure of Christianity in Asia is because they are busy taking down one another.

The above fact is only a few examples of Christian internal diversity that has the potency of (or already caused) conflicts. Though in reality, most of the times these conflicts remain out of surface and not confronting or demonstrative. However, it becomes a sort of mindset built over generations that results a suspicious atmosphere with some stereotypes in each side.

### **3. Developing Ecumenical Dialogue – Entry Point upon Constructing Togetherness in Diverse Denomination**

With the spirit of interfaith dialogue that continuously develops, then Christianity must reflect and start a productive and constructive dialogue in internal interdenomination. It is true that the deadlock on communication and misunderstanding in many things tackle Christianity in Indonesia to positively contribute towards this nation's situation and struggle. It tends to be busy

ini dapat dimuarakan dalam dua hal konkret, yang pertama: format ecumenical Dialogue (dialog ekumenis) dan Ecumenical in Action (gerakan Ekumenis yang terwujud dalam aksi bersama).

Beberapa proses Ecumenical Dialogue sudah digagas di kalangan interdenominasi, misalnya Dialog Teologi gereja-gereja mitra PKN<sup>6</sup> dengan gerakan karismatik, dan juga yang baru saja dilakukan pada 2 Februari 2013 lalu, yaitu Percakapan Ekumenis dalam Spirit Memperingati 50 tahun Konsili Vatikan II<sup>7</sup>. Percakapan ekumenis ini tidak saja diikuti oleh perwakilan Katolik dan Protestan, tetapi juga kalangan Injili dan Pentakosta-Karismatik. Dalam ecumenical dialogue kalangan interdenominasi bisa berdiskusi secara khusus tentang pokok-pokok teologis (yang mungkin selama ini cenderung dihindari – untuk dibicarakan, baik keunikan dan bahkan perbedaan-perbedaannya), khususnya terkait wawasan oikumene dan perbedaan doktrin yang ada di dalam 'keluarga Kristen'. Prinsip dan semangat “belajar dari satu sama lain' diberlakukan, dimana dalam proses dialog itu masing-masing tetap membawa identitas sejati dari tradisi dan doktrin untuk didialogkan secara terbuka. Dengan demikian proses mendialogkan keunikan dan identitas masing-masing dilakukan dalam suasana yang jernih. Hal ini membuka pintu pada pemahaman, pengenalan dan penghargaan satu sama lain walaupun tidak harus berujung kepada penyeragaman. Proses dialog yang produktif, kritis, namun konstruktif mensyaratkan keterbukaan dan penerimaan terhadap kepelbagaian. Dialog-dialog ekumenis yang melibatkan berbagai level umat, seperti imam, kaum awam, pemuda, perempuan, akademisi perlu semakin diinisiasi. Bahkan dalam pengalaman penulis sendiri, dialog yang dibangun dengan metode live in misalnya, menjadi ajang exchange pengalaman, Pengenalan

<sup>6</sup> Gereja-gereja di Indonesia yang merupakan mitra gereja-gereja Protestan di Belanda.

<sup>7</sup> Ecumenical Dialog ini digagas oleh Komisi Teologi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Komisi Teologi Konferensi Wali Gereja di Indonesia (KWI). Spirit 50 tahun Konsili Vatikan II, yang mana dokumen yang dihasilkan dari Konsili tersebut memberi stand position yang jelas terhadap keterlibatan gereja Katolik di dunia, dan dengan demikian menginspirasi cara dan arah berteologi gereja, khususnya dalam tiga isu besar, yaitu: 1). iman dan kemajuan ilmu pengetahuan, 2). gereja dan negara modern, 3). serta toleransi hidup lintas agama.

with so many internal conflicts. Then, ecumenical movement is as a symbol of united steps towards echoing discourse<sup>5</sup>. At least, this ecumenical movement can track down to two concrete things: Ecumenical Dialogue and Ecumenical in Action.

Several process of Ecumenical Dialogue have been discussed in interdenomination, as for example, Theology Dialogue of PKN partnered churches<sup>6</sup> with charismatic movement on February 2, 2013 - “Ecumenical Dialogue in the Spirit of Fiftieth Year of Vatican Counsel II.”<sup>7</sup> This ecumenical dialogue was not only from Catholic and Protestant representatives, but also from Biblical and Pentecost – Charismatic. In ecumenical dialogue, interdenomination can discuss specifically about theological points (that so far seems to be avoided to discuss, in terms of specialties and differences), especially related to the discourse of Eikumene and doctrine differences in Christianity. The principle and spirit “to learn from each other” was conducted, in which in the dialogue, each carried the true identity from tradition and doctrine to set in an open dialogue. Therefore, the process to set self uniqueness and identity in dialogue was done in a clear atmosphere. This opened door to understanding, introduction and appreciation from one another, though it didn't end in uniformity.

This kind of productive, critical but constructive dialogue sets up a prerequisite of openness and acceptance towards diversity. Ecumenical dialogue involves many layers of people,

<sup>5</sup> As for example, the discourse of the united movement in the format of oikumene has long been the agenda of Churches Commission of Indonesia (PGI), an umbrella organization that covers 88 sinodes from all over Indonesia.

<sup>6</sup> Churches in Indonesia are partners of Protestant churches in Netherland.

<sup>7</sup> Ecumenical Dialog was proposed by the Indonesian Churches Commission (PGI) and Churches Representatives Theology Conference (KWI). The fiftieth year spirit of Vatikan Counsel II, in which the documents resulting from the counsel give clear stance towards the involvement of Catholic church around the globe, and thus inspire the way adn direction of Theology in church especially in three major issues: 1). faith and the advancing science, 2). churches and modern nation, 3). inter-religion tolerance.

akan paradigma, konsepsi dan praksis masing-masing yang efektif. Segenap upaya ini dimuarakan agar pengenalan satu sama lain serta pemahaman dapat dibangun dalam kerangka mengemban misi bersama dalam konteks interdenominasi dan kemajemukan.

#### **4. Ecumenical in Action – Mengejewantahkan Misi Bersama di tengah-tengah realitas Masyarakat Majemuk**

Satu entry point lagi yang sangat efektif untuk membangun dialog dan kebersamaan adalah apa yang digulirkan selama ini oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) sebagai konsep Ecumenical in Action (gerakan Ekumenis yang terwujud dalam aksi bersama). Konsep ini merupakan sebuah pengertian ekumenis yang lebih bersifat fungsional, dimana kerjasama dan sinergisitas antar denominasi lebih mudah untuk diwujudkan dalam tindakan konkret melalui aksi-aksi bersama menyikapi dan merespon isu-isu sosial kemasyarakatan. Sesungguhnya banyak hal yang memerlukan tanggapan kritis kekristenan seperti persoalan Hak Asasi Manusia, penguatan Ekonomi Rakyat, kebebasan umat Beragama, perlawanan terhadap korupsi, kekerasan, proses demokratisasi, tanggap bencana, dsb. Pergulatan ini mestinya melampaui persoalan internal interdenominasi. Dengan kesadaran bahwa gereja perlu memberi jawab dan berkontribusi aktif dalam kehidupan umat manusia, maka Ecumenical in Action menjadi pisau sinergisitas yang patut diperhitungkan dan di'asah' terus-menerus.

Dalam tataran nasional, aras payung gereja seperti PGI, KWI, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili di Indonesia (PGLII), Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia (PGPI), Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Gereja Ortodoks, Gereja Bala Keselamatan, telah mendirikan Forum Umat Kristiani di Indonesia (FUKRI). FUKRI adalah sebuah gerakan yang bukan melembaga, tetapi sebagai spirit dan movement bagi kesatuan dan aksi bersama interdenominasi. Akankah forum ini menjadi pintu masuk yang lebih lebar untuk terjalinnya dialog, pemahaman, dan sinergisitas yang lebih efektif bagi pengejewantahan misi di tengah masyarakat majemuk? Semoga saja ..... \*

including the big society, youths, women, scholars and else. Even in the writer's experience, dialogue, constructed with live in method for example, became the venue of exchanging experience, introducing paradigm, conception, and practice. This effort began that the effort of self introducing as well as introduction can be constructed in terms of interdenomination and pluralism mission.

#### **4. Ecumenical in Action – Manifesting Common Mission in the Reality of Plural Society**

Another effective entry point upon constructing dialogue and togetherness as what the Indonesian Churches Commission (PGI) is Ecumenical in Action. This concept is a functional ecumenical understanding, whereas cooperation and synergy on interdenomination get easier through concrete action to respond social issues. Truly, there are things that need the Christians to respond like human rights, social economic empowerment, corruption eradication, violence, democracy process, disaster management, etc. This struggle must breach the internal issues of interdenomination. With the awareness that churches must answer and actively contribute in the life of mankind, Ecumenical in Action can be the tip of synergy to count on and shape over time.

In national level, the umbrella organization like PGI, KWI, Indonesian Church Communion and Biblical Institution (PGLII), Indonesian Pentecost Churches Association (PGPI), Indonesian Baptism Church Union, Orthodox Church, Salvation Church have set up Indonesian Christian Forum (FUKRI). FUKRI is a movement not institution, more likely to be a spirit and movement for unity and action towards interdenomination. Will this forum be the wider entrance for effective dialogue, understanding, and synergy in the plural society? Hopefully.... \*



## Dialog Memerlukan Kultur Intelektual dan Hubungan Sosial

Catatan Kasus Syi'ah di Sampang di antara Keyakinan Teologis dan Kejahatan Kemanusiaan

Oleh: A.M. Safwan\*

Hampir lima bulan, sejak Agustus 2012 hingga Januari 2013, sebuah kelompok pengajian Islam Syi'ah di Sampang terusir dari rumah dan sumber penghidupan mereka sehari-hari. Sekira 84 keluarga harus mengungsi. Mereka terpaksa tinggal di Gedung Olah Raga Sampang, Madura. Beberapa hari kemudian, banyak pengungsi yang terpaksa harus meninggalkan GOR. Di antara alasan mereka yang meninggalkan pengungsian adalah karena harus melanjutkan pendidikan di luar Sampang atau agar mereka dapat mengelola sumber pendapatan untuk keluarga dengan mengungsi ke rumah keluarga yang dekat dengan ladang pertanian mereka.

Pemerintah Pusat melalui Menteri Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa kasus ini berawal dari konflik keluarga. Katanya, konflik itu terjadi antara adik dan kakak yang bernama Rois dan Kyai Tajul Muluk (pemimpin kelompok Syi'ah Sampang). Konflik inilah yang meluas menjadi konflik sosial. Sedangkan Pemda Sampang mengemukakan, konflik ini timbul sebagai bentuk penolakan masyarakat Sampang terhadap



\* Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa, Madrasah Murtadha Muthahhari Rausyan Fikr, Yogyakarta

## Dialogue Needs Intellectual Culture and Social Relation

A note from *Shi'a's* persecution in Sampang, between Theological Belief and Crime against Humanity

By: A.M. Safwan\*

Nearly five months, since August 2012 to January 2013, a group of *Shi'a* Islam in Sampang had been expelled from their homes and living. Approximately 84 families had to flee their homes. They were forced to live in Sampang sport hall, Madura. A few days later, many refugees were even forced to leave the sport hall. Among other reasons of why they left the place was to continue their education outside Sampang or to manage family living by fleeing to the nearest farms of their relatives.

Central government through the Minister of Religious Affairs of Republic of Indonesia stated that the conflict began with a family conflict. It says that the conflict occurred between brothers, named Rois and Kyai Tajul Muluk (the leader of *Shi'a* in Sampang). This conflict then spread out as a social conflict. Meanwhile, local government of Sampang stated that the conflict rose up as a form of rejection from people in Sampang towards the existence of *Shi'a* in the place.

\* The Leader of Islamic Student Boarding School, Madrasah Murtadha Muthahhari Rausyan Fikr, Yogyakarta

keberadaan Syi'ah di Sampang. Pernyataan ini kemudian didukung fatwa MUI Jawa Timur dan MUI Sampang.

Dalam penyerangan ratusan orang itu, fakta yang dapat kita lihat adalah salah satu anggota kelompok Syi'ah Sampang tewas, rumah-rumah mereka dibakar dan mereka diusir dari tanah yang telah menemani mereka sejak lahir. Fakta yang gamblang bahwa saat itu bupati ikut menolak warganya sendiri yang menganut keyakinan Syi'ah. Fakta yang lebih gamblang bahwa kini ratusan pengungsi tersebut hampir lima bulan tinggal di GOR Sampang dan mereka tidak mendapat kejelasan dari pihak terkait sampai kapan mereka harus tinggal di pengungsian, bagaimana rencana penyelesaian kasus itu agar mereka bisa kembali punya rumah? Bagaimana nasib mereka pasca penyerangan itu? Sama sekali tidak ada keterangan dari pemerintah, apalagi jaminan. Padahal jelas-jelas UUD 1945, sebagai konstitusi negara kita, menjamin setiap warga Indonesia untuk dapat menjalankan keyakinannya sesuai dengan agama yang ia anut. Oleh karena itu, simpul pertama masalah ini bahwa ada tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan terhadap kelompok Syi'ah Sampang dan menimbulkan korban jiwa dan harta serta psikologis yang berat. Artinya tentu bahwa siapapun korbannya, mereka harus dibela haknya sebagai korban dan negara wajib menjamin hak-hak korban kejahatan ini.

Hingga detik ini, saya memandang, seperti banyak kalangan melihat, pemerintah tidak berpihak pada penyelesaian masalah yang dihadapi korban. Konstruksi penyelesaian masalah banyak dibebani dengan prasangka teologis dari ajaran Syi'ah yang dianut para korban. Pemerintah lewat Presiden SBY langsung tampak menunjukkan itikadnya untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi sampai di tingkat pemerintah lokal (Pemda) kita tidak melihat jbaran operasional bagaimana penyelesaian masalah ini. Karena harus berhadapan dengan budaya politik lokal (hubungan penguasa – ulama – masyarakat). Hal ini juga yang menyulitkan resolusi konflik yang dilakukan oleh

The statement was then supported by fatwa from Indonesian Ulema Council (MUI) of Eastern Java and Sampang.

In the assault of hundreds of people, a member of *Shi'a* group in Sampang was killed, their houses burned, and they were expelled from the land they had inhabited for a long time. This shocking fact at that time was that the regent rejected *Shi'a* people, notably his people as well. Another fact says that until now, hundreds of refugees have spent almost seven months in Sampang sport hall, awaiting confirmation from the authority as when they can leave, how the resolution is, and how would the settle after the incident. At all, there is no exact statement from the government, and no guarantee. Clearly the constitution, *UUD 1945* guarantees every citizen to be able to conduct their beliefs as in accordance to their religion. *Therefore, the first knot of this conflict is that there is a criminal done against Shi'a group in Sampang and resulting in casualty and physical lost as well as severe psychological damage.* It means that whoever the victim is, their rights must be restrained and that the State must secure their rights.

To now, I see that many sides look upon this conflict as if the government takes no side on resolving it. The resolving construction of this conflict is weighed by theological presumption from *Shi'a* teaching that the victims conduct. The government, through President SBY, indeed directly shows its intention to solve the conflict. However, we fail to see the operational conduct at local government level since it has to deal with local culture (the relation among the state – religious leaders – society). This thing burdens conflict resolution done by civil society element (NGO and Mass Organization) upon constructing dialogue as a start towards peace effort.

elemen masyarakat sipil (LSM dan ormas) dalam membangun dialog sebagai langkah awal yang harus ditempuh dalam setiap upaya perdamaian.

Dialog ini penting untuk meredakan prasangka yang mungkin berkembang meluas menjadi isu teologis. Alat yang biasanya menjadi sasaran utama dari setiap target konflik. Dalam kasus Sampang, ikhtiar dialog sudah pernah terwujud. Sayang sekali, persoalan budaya politik lokal gampang mengalihkan cita-cita mulia membangun dialog. Apa sebabnya? Menurut saya, kuatnya peran ulama setempat yang sesungguhnya memiliki peran strategis dan menjadi simpul penting penyelesaian kasus Sampang belum tampak kesungguhan membangun dialog.

Pihak korban, pada dasarnya adalah minoritas yang sangat minor. Mereka adalah pihak yang setiap saat siap berdialog. Apalagi mereka menantikan dan menanti hingga kini penyelesaian hukum yang tak kunjung jelas.

Secara struktural dan kultural, dialog yang konstruktif bagi itikad perdamaian tidak tampak. Elemen resolusi konflik tampak sulit didekati apalagi diajak dalam sebuah mediasi yang konstruktif. Satu catatan penting saya, bahwa kasus ini adalah penyerangan sekelompok orang Islam menyerang kelompok Islam Syi'ah. Secara praktis kepentingan teologis itu ada, tapi apa mungkin kejahatan dipicu oleh motif teologis secara murni (yang sakral dan suci)? Fakta ada perbedaan teologis antara pihak penyerang dan pihak yang diserang, tetapi fakta ada kejahatan kemanusiaan (kriminal) juga fakta yang lebih gamblang dan mudah dijadikan acuan pelanggaran hukum.

Saya melihat ini sebagai tragedi teologis dengan pemicu psikologis-politik. Maksud saya, ada bumbu teologis yang terasa, tetapi ada kepongahan manusia yang pekat di dalamnya yang sulit dicerna oleh akal sehat manusia (beragama atau tidak beragama

Dialogue, in this case, is essential to put down presumption – which likely to expand as theological issue. It is the tool commonly targeted out of a conflict. In the case of Sampang, dialogue discourse was once popping up. To a shame, local politic culture easily deviates from its construction. Why? I believe that the strong influence of local religious leaders truly has strategic role upon being an essential knot to solve the conflict in Sampang – of which they haven't shown the sincerity to construct any dialogue.

On the other hand, the victims are the true minority. They are the side that is ready to open dialogue at any given time. Moreover, they have been expecting law resolution which remains absurd.

Oleh karena itu, simpul pertama masalah ini bahwa ada tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan terhadap kelompok Syi'ah Sampang dan menimbulkan korban jiwa dan harta serta psikologis yang berat.

Structurally and culturally, constructive dialogue to peace intention is invisible. The elements of conflict resolution seem to be

out of reach, even to a constructive mediation. A not that I make, this case is an assault of an Islamic group to Islamic *Sh'ia* group. Practically, theological motive exists, but could it be the crime was triggered by a pure theological motive (the sacred one)? The fact is that there is theological difference between the men assaulting and the victims. However, there is the fact that crime against humanity occurred can be made a point towards law violation.

I see this conflict as a theological tragedy with psycho-politic trigger. I mean, still, there is a theological sense existing but there is mankind arrogance in it that is hardly to accept (religious or non religious). Apparently, government started out with clear headed. However, it ended up with

sekalipun). Tampaknya Pemerintah sudah mengawalinya dengan akal sehat tapi berakhir dengan aroma psikologi politik. Pemerintah tampak masuk sebagai pembela korban tetapi membiarkan pelaku bergentayangan. Akhirnya, yang bergentayangan justru yang kini menjadi faktor yang menyulitkan penyelesaian kasus Sampang ini, Sosoknya jelas, tetapi tidak bisa disentuh.

### Dialog adalah Basis Utama: Teoretis dan Praktis

Dengan gambaran singkat di atas, konstruksi dasar sebuah persentuhan teologi dengan realitas sosial bahwa keyakinan teologis dapat menjadi pemicu yang efektif untuk sebuah kejahatan. Padahal kejahatan adalah dasar utama kehadiran teologis untuk membimbing manusia melawannya. Dialog adalah masalah kandungan batin manusia. Dialog bukan hanya masalah praktis tetapi juga teoretis. Secara praktis, dialog memerlukan iklim sosial yang kondusif secara kultural. Secara teoretis, dialog memerlukan prasyarat dasar pengetahuan. Oleh karena itu, dialog adalah masalah intelektual (pengetahuan), spiritual (kandungan batin), dan sosial (individu-teologis dan masyarakat-realitas sosial).

Jika prasyarat teoretis-praktis itu tidak tampak atau tidak diusahakan terus menerus, maka sulit mendapatkan penyelesaian setiap konflik secara komprehensif. Teologi pun mensyaratkan dialog batin manusia dengan Tuhannya dalam memaknai kejahatan yang muncul dari diri dan lingkungan yang mempengaruhi hubungan dirinya dengan Tuhan. Kenyataan bahwa manusia memiliki potensi untuk melakukan kejahatan maupun kebaikan, disadari sepenuhnya manusia dapat melakukan untuk dirinya maupun untuk orang lain. Secara teoretis, dialog adalah masalah batin yang membutuhkan intelektualisme (keterbukaan dan kejujuran bahwa potensi kejahatan dan kebaikan ada pada setiap manusia yang beragama atau tidak beragama). Secara praktis, dialog harus menjadi agenda kebudayaan oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah.

Tampaknya, dialog sebagai agenda budaya tidak terlihat sungguh-sungguh dikondisikan oleh pemerintah. Kritik terhadap kehadiran MUI dalam wacana sesat-mensesatkan, saya menghargai

psycho-politic sense. The government seems to dive in defending the victims, but letting go the perpetrators. At the end, what hangs loose is now the factor that hardens the solvency of the conflict in Sampang. The picture is clear, but remains untouchable.

### Dialogue as the Main Basis: Theoretical and Practical

With a brief description above, the main construction is a crossover between theological and social reality that theological belief can be an effective trigger to a crime. On the contrary, crime is the main reason that theology comes to guide mankind fight for it. Dialogue is also a subconscious matter of mankind. Dialogue is not merely a practical issue but also theoretical issue. Practically, dialogue requires conducive social climate in terms of culture. Theoretically, dialogue requires the prerequisite of knowledge. Therefore, dialogue is a matter of intellectual (knowledge), spiritual (subconscious thought) and social (theological individual and society of social reality).

If the theoretical-practical prerequisite remains invisible and not restrained, then it is difficult to earn comprehensive conflict resolution. Theology even sets up that men to have dialogue with God upon understanding crime that affects the relation of men and God. People are fully aware on the fact that men have the potential to conduct crime or good deeds towards self of other people. Theoretically, dialogue is the subconscious matter that requires intellectualism (openness and honesty that the potency of crime and good deeds lays on every human regardless their religion). Practically, dialogue must be an agenda of culture in the society and government.

It appears that dialogue as cultural agenda is not really meant by the government. I do appreciate



pendapat hukum (fatwa) ulama terhadap isu kesesatan sebuah ajaran. Tetapi fatwa kesesatan harus berada dalam bingkai intelektualisme-dialogis (teoretis) bukan dalam posisi impunitas sosial (praktis). Tampaknya, tantangan utama masyarakat sipil adalah membentuk suatu relasi yang jelas antara Keagamaan, Keislaman dan Keindonesiaan dalam bingkai the *founding fathers* kita: NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika.

Tantangan kelompok agama adalah kesediaan untuk menapak masalah dialog agama bukan semata sebagai masalah praktis. Tetapi juga meletakkannya sebagai masalah teoretis yang terkandung dalam jiwa-intelektualisme dan spritualisme manusia. Jadi, keagamaan memang adalah masalah teoretis dan praktis. Sedangkan ke-Indonesiaan kita adalah masalah praktis. Maka ke-Indonesiaan harus

m e n j a m i n  
m a s a l a h  
t e o r e t i s  
m a n u s i a  
(K e b e b a s a n  
b e r a g a m a d a n  
b e r k e y a k i n a n)  
d a n m e n g a t u r  
m a s a l a h p r a k t i s  
(s o s i a l , b u d a y a ,  
p o l i t i k ) .

Keduanya tidak bisa dicampuradukkan. Pada saat yang sama, dialog pun harus berarti secara teoretis. Toh, buat saya Tuhan adalah milik semua alam kosmos (manusia dan alam). Jadi realitas Tuhan jauh lebih prinsip daripada agama. Maka, dialog agama tidak mungkin menggeser posisi keberimanan terhadap Tuhan. Jadi, agama apapun, tidak beragama sekalipun, Tuhan bisa diletakkan dalam semua agama bahkan yang tidak beragama. Tuhan adalah klaim universal. Bahasa dan makna Tuhan dalam agama adalah dinamika intelektual-batin manusia. Buat saya, dialog perlu menuntaskan problem intelektual ini. Sembari dialog dalam tendensi praktis adalah jalan yang juga tidak mungkin diabaikan.

Wallahu'alam bi al shawab. ★

the critics on the stance of MUI towards the deceitful discourse as a law frame (fatwa). However, the deceitful fatwa must be in the frame of intellectual dialogue (theoretical) and not in the form of social impunity (practical). It seems that the main obstacle for the civil society is to build a clear relation between Islamic belief and nationalism within the frame of our *founding fathers*: NKRI, UUD 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*.

The challenge on religious group is the willingness to review the case of religious dialogue as a not merely practical matter. It is also a theoretical matter that contains the spirit of intellectualism and spiritualism of mankind. Then, religion is a theoretical and practical matter. On the other hand,

**Secara teoretis, dialog adalah masalah batin yang membutuhkan intelektualisme (keterbukaan dan kejujuran bahwa potensi kejahatan dan kebaikan ada pada setiap manusia yang beragama atau tidak beragama). Secara praktis, dialog harus menjadi agenda kebudayaan oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah.**

o u r  
n a t i o n a l i s m  
i s  
a  
p r a c t i c a l  
m a t t e r .  
T h e n  
o u r  
n a t i o n a l i s m  
s h o u l d  
s e c u r e  
t h e  
i s s u e  
o n  
t h e o r y  
(t h e  
f r e e d o m  
o f

religion and belief) and administer its practice (social, culture, politic). Both cannot be mixed up. At the same time, dialogue should be theoretically meaningful. As for me, God belongs to all cosmic nature (mankind and nature). Therefore, the reality of God is more than religious stance. Thus, internal and inter-religious dialogue can not shift the faith towards God. God can be put in all religions. God is the universal claim. The language and meaning of God in religion is the dynamic of intellectual and spiritual. For me, internal dialogue needs to solve this intellectual problem. Also, internal dialogue is a practical approach that should not be forgotten.

Wallahu'alam bi al shawab. ★

## MOSINTUWU, SEBUAH HARAPAN JALINAN PERDAMAIAN DI POSO

Ingatan mengenai konflik Poso, bagi kita yang tak terlibat di dalamnya, lebih sering kita peroleh melalui serpihan-serpihan fakta yang dibungkus media konvensional. Berbagai narasi itu mengumpul bahkan seringkali membeku. Ia menjelma menjadi seperangkat pengetahuan yang seringkali membelenggu kesadaran, daripada sebuah narasi yang harus diperiksa ulang. Padahal, acapkali narasi-narasi itu diolah dengan berbagai hubungan yang menyelipkan agenda politis tertentu. Fatalnya, masih ada yang menganggap bungkus fakta itu sebagai sebuah kebenaran absolut tanpa skeptisisme dalam memercayainya.

Institut MOSINTUWU, sebuah organisasi masyarakat akar rumput yang anggotanya terdiri dari para survivor konflik Poso, hadir dengan niat memberikan warna berbeda dalam narasi-narasi itu. Dipelopori Lian Gogali sebagai ketua, MOSINTUWU berusaha mengoreksi serta mendekonstruksi mengenai ingatan-ingatan sejarah yang selama ini beralur vertikal struktural. Anggota-anggota dalam organisasi ini berusaha melelehkan segala bentuk kebekuan wacana yang selama ini dijejalkan kepada masyarakat mengenai konflik. Alurnyapun mengalir dari tuturan-tuturan para korban untuk sesama.

INSTITUT MOSINTUWU yang berlokasi di Jl. Watumpoga'a No. 13A, Pamona, Puselembah, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ini menyebarkan berbagai wacana yang dapat kita lihat sebagai cara untuk memikir ulang sejarah yang berasal dari atas. Menggerakkan rakyat untuk bersama-sama membuat narasi mereka sendiri. Sebuah benih yang berniat menjadikan masyarakat sebagai subjek. Bukan sekedar bahan yang mudah diracik menjadi apa yang dimau kuasa tertentu. Sebuah organisasi yang berusaha mengartikulasikan apa yang dikehendaki masyarakat dengan mengedepankan sebisa mungkin menyuarkan kegelisahan serta permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat saat konflik atau pasca

## MOSINTUWU, A HOPE OF PEACE THREAD IN POSO

The memory upon Poso conflict, for us that were not involved, seems to be in pieces of fact wrapped by conventional media. Some of those narrations are flocked and mostly frozen. They turn into a set of knowledge that shackles our awareness – rather than being narrations to review. In fact, those narrations carry along some particular political agenda. To even worse, still there are people consider those stories as an absolute truth without being skeptical in trusting them.

MOSINTUWU institute is a grass-root social organization consisting of survivors of Poso conflict with the intention to provide different perspective upon those narrations. With *Lian Gogali* as the leader, MOSINTUWU tries to correct and deconstruct historical memories that have been structurally vertical along this time. The members of this organization try to melt down the frozen discourse that has been stuffed to the public concerning Poso conflict. It streams down to the very speech from the victims.

MOSINTUWU Institute resides at Jl. Watumpoga'a 13 A, Pamona, Puselembah, Poso Regency, Central Sulawesi (Celebes). It spreads out various discourses of perspective for us to see and rethink the vertical history. It moves people to together create their own narration – a seed that intends to place people as subject, not merely a component under the hand of a ruler. This organization tries to articulate what people want by putting forward and voicing the insecurity upon problems that are faced during and post the conflict.

konflik.

“Saya dulu beranggapan bahwa muslim itu suka kekerasan, bahkan kami tidak boleh bergaul dengan perempuan yang berjilbab karena haram. Sewaktu ada kunjungan kelas Sekolah Perempuan di masjid, saya punya kesempatan untuk bertanya dan ternyata muslim itu tidak seperti yang selama ini saya bayangkan atau yang saya dengar. Kita bisa tetap berteman dan berdekatan dengan yang memakai jilbab, bahkan muslim itu tidak mengajarkan membunuh hanya saja oknum yang beragama seringkali punya penafsiran yang berbeda.” Tutur salah satu peserta dalam program sekolah perempuan yang dilakukan Mosintuwu. Pada sekolah perempuan inilah, perempuan-perempuan dengan latar belakang agama Islam dan Kristen (Protestan dan Katolik) berkumpul, saling berbagi mengenai kegelisahan yang mereka rasakan. Saling mengenal satu sama lain. Dalam rangka melubangi tembok yang selama ini dibangun saat konflik dan secara perlahan mulai meruntuhkan tembok-tembok itu.



“I used to assume that Moslems love violence; that we could not hang out with the girls in veil since it is considered *haram*. Once there was a visit from female school at the mosque and I had this opportunity to raise question, it turned out that Moslems are not as the same as I had imagined or heard. We could still be friends and acquainted to the girls in veil. Moslems even do not teach murder. It is that some might have different interpretation”, said one of the participants in the Women's School programs conducted by MOSINTUWU. At this Women's school, girls

from different religious background like Islam and Christian (Protestant and Catholic) gather and share the insecurity that they feel. They get to know each other, in the framework of putting a hole to a wall that is built during the conflict and

breaking it down.

Nama MOSINTUWU diambil dari bahasa Pamona (salah satu suku di Poso) yang berarti “Bekerja bersama-sama”. Dengan arti itu, organisasi ini terbuka bagi siapapun warga untuk ikut dalam setiap kegiatannya. Selain sekolah perempuan, MOSINTUWU juga melakukan kegiatan di berbagai bidang. Bidang Pendidikan berupa Sekolah Perempuan dan Project Sophia –Perpustakaan Keliling untuk anak-anak, Bidang Perlindungan, Pemulihan dan Pemberdayaan berupa Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak serta Media dan Data Base. Berbagai kegiatan serta artikel-artikel tentang organisasi ini dapat dilihat di Website Institut

The name MOSINTUWU is taken from Pamona language (a tribe in Poso), meaning “working together”. Under such meaning, this organization is open to anyone to participate in activity. Besides women's school, MOSINTUWU also conducts activities in various fields. There are education sector like women's school and *Project Sophia* - a mobile library for kids, protection, recovery and empowerment sector like shelter for women and kids as well as media and database. The activities and articles on this organization can



Mosintuwu yaitu <http://perempuanposo.com>.

Dengan VISI perjuangan berupa rakyat berdaulat atas hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil politik, Mosintuwu memulai berbagai kegiatan tersebut dengan memadukan antara apa yang diwacanakan dengan aktif memproduksi rantai-rantai pengikat kebersamaan. Berbagai pendekatan kepada masyarakat untuk saling memahami dan menjadi subjekpun dilakukan tahapan demi tahapan. Strategi yang ditumbuhkanpun lebih ke pendekatan memahami budaya masyarakat setempat. Penyadaran untuk saling memahami dan mendengar satu dengan yang lain. Bahwa perbedaan identitas agama bukan berarti mudah dipecah-belah dengan melakukan kekerasan pada kelompok lain. Bahkan perbedaan itu dapat dirasakan dengan keindahan, bagai pelangi di senja hari.

**Strategi yang ditumbuhkanpun lebih ke pendekatan memahami budaya masyarakat setempat. Penyadaran untuk saling memahami dan mendengar satu dengan yang lain. Bahwa perbedaan identitas agama bukan berarti mudah dipecah-belah dengan melakukan kekerasan pada kelompok lain. Bahkan perbedaan itu dapat dirasakan dengan keindahan, bagai pelangi di senja hari.**

Kebutuhan masyarakat pada sebuah lembaga yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membangun kepentingan bersama-sama, apalagi di tengah warga sedang konflik sangat besar. Masyarakat di satu sisi butuh orang-orang yang dipercaya untuk menyuarakan kegelisahan mereka, di sisi lain, mereka butuh organisasi di luar organisasi keagamaan "resmi" atau buatan lembaga-lembaga keagamaan, yang dapat digunakan untuk memanjat tembok yang selama ini menutup pengetahuan mereka akan yang lain. Dengan MISI Institut Mosintuwu memperkuat wacana dan perjuangan kedaulatan rakyat atas hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak sipil politik dalam konteks masyarakat konflik dan pasca konflik. Semoga masyarakat Poso dapat hidup damai dan menikmati indahnya berbeda. Kami selalu mendukung perjuangan dan harapan teman-teman Institut Mosintuwu!\*

be seen in MOSINTUWU institute website: <http://perempuanposo.com>.

With the VISION of people sovereignty over economic, social cultural and political rights, MOSINTUWU begins the activity by combining discourse and actively producing the chain of togetherness. Various approaches to the society to understand each other and become subject are done step-by-step. The strategy developed is more to the approach to the local communities. It is the

awareness to understand and hear each other that is most important, that the difference in religious identity does not mean to violate other groups. Difference can even be beauty like the rainbow in the break of day.

The society needs an institution that can stand as a tool to build common interest, especially in the midst of a greater conflict. The society, on one hand, needs trusted people to voice their insecurity. While on the other hand, they need an organization beyond the 'official' and 'artificial' religious organization or institution that can be used to climb the wall covering their knowledge. MOSINTUWU Institute stands with the MISSION to empower discourse and the struggle on people's sovereignty on economic, social, cultural, and political rights in the context of conflict and post-conflict society. May people in Poso live peacefully and enjoy the beauty of differences. We will always support the struggle and hope of our friends in MOSINTUWU Institute!\*



## Lokakarya Guru-guru Agama Se-DIY: “Meningkatkan Peran dan Fungsi Guru Agama di Sekolah sebagai Aktor Perdamaian Berbasis Antar-iman”

Dalam rangka mempersiapkan agen-agen perdamaian berbasis antar-iman melalui sekolah-sekolah, Interfidei sejak tahun 2004 sampai sekarang telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan bagi guru-guru agama (tingkat SLTP dan SLTA). Lokakarya telah dilakukan baik di tingkat wilayah maupun di tingkat Kabupaten di seluruh DIY dan menghasilkan sebuah komunitas yang diberi nama Forum Komunikasi Guru-guru Agama (FKGA). Setelah lokakarya, para guru agama dari latar belakang agama dan etnis yang berbeda itu terlibat aktif dalam kegiatan seperti diskusi rutin, seminar, FGD, kunjungan ke komunitas agama-agama, dan penerbitan bulletin Guru Merdeka.

Pada tanggal 21-23 September 2012, bertempat di Penginapan Camelia, Kaliurang, Interfidei bekerjasama dengan FKGA kembali lagi menyelenggarakan lokakarya untuk para guru agama se-DIY (baik sekolah swasta, negeri maupun sekolah berbasis agama). Kegiatan kali ini mengangkat tema “Meningkatkan Peran dan Fungsi Guru Agama di Sekolah sebagai Aktor Perdamaian Berbasis Antar-iman” dan diikuti oleh 23 orang peserta (laki-laki dan perempuan) di antaranya dari SMA Bopkri 1, SMU Muhammadiyah, SMU Pangudi Luhur, SMU PIRI, SMUN 6, dan lain-lain. Lokakarya kali ini sesungguhnya merupakan lanjutan, yang melibatkan kelompok kecil dengan materi lebih advance dan fokus, yang disarikan dari kegiatan Seminar dan FGD yang telah dilaksanakan pada 26 Mei 2012 lalu (lihat Newsletter edisi Jan-Juli 2012).

Acara kami bagi menjadi sepuluh sesi. Lebih banyak acara diisi dengan dialog. Setidaknya terdapat 70% dialog dengan selebihnya menonton film, pengantar setiap sesi dan permainan dari fasilitator. Seperti yang dituturkan Pak Sartana: “Dialog transparan adalah cara untuk mengurai segala kebekuan yang mengendap dalam pikiran kita”. Kami hanya berfungsi sebagai pemandu untuk mengajak dialog bersama. Fasilitator pada acara ini adalah Wiwin Siti Aminah, Anis Farikhatin, Pak Sartana, Romo Suhardiyanto dan Elga Sarapung.

Selama tiga hari berturut-turut pendidik agama di sekolah-sekolah DIY duduk bersama, berrefleksi bersama,



## Workshop for Religious Teachers of DIY “Improving the Role and Function of Religious Teachers as an Actor of Peace Based on Interfaith”

Camelia Guesthouse, Kaliurang, Yogyakarta,  
21-23 September 2013

Since 2004 Interfidei has conducted some programs for junior and senior high school religious teachers to prepare some agents of peace based interfaith in schools. Workshops have been held at regional and district of DIY and we have made a forum named Religious Teacher Communication Forum (FKGA). After the workshops the teachers who come from different religions and ethnicities background taking a part in routine discussion, focus group discussion, visit to the religion communities and publication a newsletter named Guru Merdeka.

On 21-23 September, 2013 at Camelia Guesthouse, Kaliurang, Interfidei in cooperation with FKGA held a workshop for religious teachers of DIY from public and private (Christian and Moslem) schools in Jogja. The theme of the workshop is “Improving the Role and Function of Religious Teachers as An Actor of Peace Based on Interfaith”. The workshop was attended by 20 participants from SMA Bopkri 1, SMU Muhammadiyah, SMU Pangudi Luhur, SMU PIRI, SMUN 6, etc. This workshop is a follow up activities of Seminar and FGD on 26 May 2012 ago (January-July 2012 Interfidei's newsletter) that involving small groups with more advanced materials and focus.

There were ten sessions in the workshop that proposed in 70% dialogue, watching movie, introduction from facilitators and games. Romo Suhardiyanto said, “Dialogue is a way to break down rigidity in our mind”. Elga Sarapung, Wiwin Siti Aminah, Anis Farikhatin, Sartana dan Romo Suhardiyanto as the facilitators guided the participants to make a

melakukan ibadah menurut kepercayaan masing-masing, belajar memahami permasalahan pendidikan agama yang selama ini mereka lakukan serta cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kami memulai sesi dengan mengeksplorasi permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi peserta. Baik secara individual ketika mendidik atau secara institusional. Di antara permasalahan-permasalahan yang dikemukakan peserta banyak terkait dengan isu-isu media seperti tawuran, korupsi, kekerasan terhadap minoritas, pornografi dan lain-lain. Kami kemudian mendiskusikan permasalahan tersebut dengan cara, pertama membahas dan mengeksplorasi akar permasalahan tersebut. Kemudian kami merefleksikan bersama dan langkah terakhir adalah metode menyelesaikannya. Tentu saja semua itu dengan harapan, benih-benih perdamaian dapat tumbuh subur menegarkan anak bangsa.

dialogue together.

In a three-day workshop the participants sat down and reflected together, worshiped according to their religions, learnt to understand the problems of religious teaching they are doing and found out a way to solve them.

We started by exploring some problems they have faced individually and institutionally when teaching. There were a lot of problems that related to media issues such as students fighting, corruption, violence against minorities, pornography and others. We discussed the issues one by one by sharing and exploring the roots of the issues. Then, we reflected together and found out the way to solve the issues. Hopefully, by the workshop, the seeds of peace can flourish the students through the teachers.

### **Peluncuran Buku “Titik Pandang: Tentang Perkembangan Masyarakat Indonesia”**

**Karya Andreas A. Yewangoe**

Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), menghadirkan kepada kita sebuah buku berisi kumpulan artikel yang pernah ditulis di Suara Pembaharuan dari 2001-2006. Acara Peluncuran sekaligus bedah buku ini telah dilaksanakan pada Rabu, 28 November 2012, di Aula Gedung Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Jakarta, menghadirkan tiga orang narasumber yakni Sabam Siagian (Redaktur Senior The Jakarta Post), Elga Sarapung (Direktur DIAN/Interfidei) dan Martin L. Sinaga (Dosen STT Jakarta) dengan dimoderatori oleh Jeiry Sumampaow (PGI). Buku setebal 209 halaman ini diberi judul Titik Pandang tentang Perkembangan Masyarakat Indonesia. Dengan munculnya buku ini pada sidang pembaca, harapan kami agar bangsa ini belajar dari masa lalu, tujuannya tentu supaya hal-hal yang merusak dan menimbulkan luka tidak berulang kembali.

Pak Yewangoe mengemas berbagai isu itu dengan refleksi teologis. Tafsir teologis atas realitas itu kemudian dibungkus dengan berbagai perspektif. Bukan sekedar pemahaman tekstual terhadap Alkitab yang kemudian dicocokkan dengan realitas, tetapi didialogkan dengan teori-teori lain dalam memahami realitas tersebut. Penulis memahami betul jika sebuah tafsir teologis tidak boleh menafikan keberadaan pemikiran ilmu-ilmu lain. Kerjasama antar ilmu sangat dibutuhkan agar tidak terjadi sebuah tafsir kosong, sebuah tafsir teologis yang menafikan dinamika kehidupan manusia sekarang.

Diperlukan kesadaran serta ketekunan yang sungguh-sungguh dari para pemuka agama agar berdialog dengan bidang-bidang lainnya. Yewangoe juga memberikan berbagai

### **Book Launch “Point of View: Development of Indonesian Society”**

**By Andreas A. Yewangoe**

Rev. Andreas Anangguru Yewangoe, Chairman of the Communion of Churches in Indonesia (PGI), bring us a book contains his 2001-2006 articles collection he had written in Suara Pembaharuan. Interfidei republish the 209-page book with the title Point of View: Development of Indonesian Society. By this book we hope that our nation can be able to learn from the past in order things are destructive and cause injury were not repeated.

Rev. Yewangoe packs the issues with theological reflection and wrapped theological interpretations of reality by various science perspectives not just a textual understanding of the bible but to dialogue with other theory in understanding the reality. Yewangoe understands that theological interpretation should not deny the existence of thought other sciences. The cooperation between sciences is needed to avoid an empty



analisis antara hubungan, agama, negara dan masyarakat. Sehingga buku ini patut menjadi salah satu alat bagi pemeluk agama atau orang-orang yang beriman, untuk terus menanyakan ulang mengenai posisi mereka dalam memahami kitab-kitab suci. Karena bagaimanapun kitab selalu hadir di ruang kita melalui manusia dan dalam bahasa manusia. Maka apa yang terjadi dengan kita sekarang membutuhkan refleksi kitab serta sebaliknya. Saling melengkapi dan menjelaskan satu sama lain. \*

interpretation, a theological interpretation that denies a daily life of people.

Awareness and persistence are needed by religious leaders to make a dialogue with other subjects. Yewangoe also gave analyzes the relationship between religion, state and society. So that, this book can be able used as a tool for people to redefine their position on understanding the bible. \*

### Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) Guru-guru Agama di Kupang

Tempat : Aula Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, NTT  
Waktu : 17 Desember 2012  
Pembicara :  
Sesi pertama  
1. Djohan Effendi  
2. Drs. Djata Dominikus, M.Si (Kementerian Agama Prov NTT)  
3. Yunus Buling (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT)  
Moderator: Pius Rengka  
Sesi kedua  
1. Lintje H. Pellu  
2. Anis Farikhatin  
3. Elga Sarapung  
Moderator: Mery Kolimon

Selain di Yogyakarta, Interfidei juga menjalankan program pendidikan alternatif bagi guru-guru agama di berbagai daerah lain di Indonesia. Kali ini di Kupang, NTT. Kondisi masyarakat NTT sangat beragam. Jika dirunut dari sejarah resmi, wilayah ini merupakan refleksi dari pendudukan kelompok bangsa Austronesia, yang juga disusul oleh interaksi dengan pedagang Arab (membawa agama Islam), China (membawa agama Khonghucu), dan disusul oleh ekspansi dagang bangsa Portugis dan Belanda (membawa agama Katolik). Peralihan agama menjadi semacam prestasi besar dan perebutan pengaruhpun berdampak pada hak menyebarkan/syiar agama besar tersebut. Namun demikian, agama-agama lokal (agama asli) tetap bertahan dan atau tetap dipelihara dengan bentuk/wadah barunya. Adaptasi ini menghasilkan kombinasi yang unik. Demikian dituturkan Lintje H. Pellu.

Meskipun begitu keragaman identitas itu juga sering digunakan sebagai alat ampuh untuk memicu konflik. Kasus konflik Ambon, Kupang, Poso adalah sebagian kecil konflik yang diberi label agama. Karena itu, keberagaman juga seperti pedang bermata dua, di satu sisi ia bisa menjadi kombinasi warna yang menarik dan indah hidup dalam perdamaian, di sisi lain ia dapat menjadi api

### Seminar and Focus Group Discussion of Religious Teachers

Place : Kupang  
Date : December 17, 2012  
Speakers :  
First Session  
1. Djohan Effendi  
2. Drs. Djata Dominikus, M.Si (Department of Religious Affairs, Province of NTT)  
3. Yunus Buling (Department of Education and Culture, Province of NTT)  
Moderator: Pius Rengka  
Second Session  
1. Lintje H. Pellu  
2. Anis Farikhatin  
3. Elga Sarapung  
Moderator: Mery Kolimon

Besides in Yogyakarta, Interfidei plans to run education programs for religious teachers in other areas in Indonesia. This time we held it in NTT. There are various conditions in NTT. By its history, NTT is a reflection of Austronesia people followed by interaction with Arab traders who bring Islam. Chinese (bring Confucianism) and followed by trading expansion of Portugal and Dutch that bring Catholic. The transition of the religion become great achievements and had an impact to spread the majority religions values. Despite that the diversity of the identities always used as tools to make a conflict. Conflict in Ambon, Kupang and Poso are one of





yang dapat menyulut konflik.

Karena itu sebuah dialog antar berbagai pemeluk agama itu sangat dibutuhkan. Disinilah pentingnya Jaringan Perempuan Indonesia Timur dengan Program Pascasarjana UKAW Kupang dan Institut DIAN/Interfidei menyelenggarakan Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) Guru-guru Agama di Kupang. Berbagai elemen guru agama dari SLTP maupun SLTA hadir dalam acara tersebut.

Anis Farikhatin menekankan pentingnya para guru agama untuk mengetahui kondisi muridnya. Bukan hanya bertolak dari pengalaman personal guru tetapi dari pengalaman sosial murid-muridnya juga. Sehingga dalam mengajar guru agama tidak hanya bertitik tolak dari teori-teori agama tetapi juga berdialog dengan permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. \*

the conflicts labeled religions. So that, the diversity as well as a double-edged sword, can be an attractive color that brings peace but in the other side it can be fire that can trigger a conflict.

A dialogue between religious leaders is needed. Women Network of East Indonesia (JPIT), Master Program of UKAW Kupang in cooperation with Insititut DIAN/Interfidei Yogyakarta held a seminar and focus group discussion for junior and senior high school of religious teachers of Kupang.

Anis Farikhatin emphasized the role of religious teachers was to understand the condition of their students not only from personal experience of the teachers but also social experience their students in order the religious teachers not only have a view from religious theories but also dialogue with social problems faced the society in teaching. \*

### **Evaluasi & Refleksi Program Pendidikan Interfidei dan Pertemuan Strategi Jaringan Antariman 10-12 Oktober 2012, di UC UGM**

Pada tanggal 10-12 Oktober 2012, kami menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan refleksi terhadap program pendidikan Interfidei yang sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir ini. Evaluasi dan refleksi yang diadakan di UC UGM ini dihadiri oleh 40 perwakilan berbagai lembaga jaringan Interfidei di beberapa daerah yang selama ini sudah melakukan kerjasama langsung maupun tidak langsung dengan Interfidei. Setelah evaluasi dan refleksi dilakukan pada hari pertama, dua hari berikutnya kegiatan dilanjutkan dengan Pertemuan Strategi Jaringan Antariman Se-Indonesia.

Dalam evaluasi dan refleksi, kami membicarakan 3 hal: pertama, apa saja yang sudah dilakukan berkaitan dengan program pendidikan Interfidei (meliputi cakupan kegiatan, manfaat, kelebihan dan kendalanya); Kedua, apa yang bisa dikontribusikan kepada jejaring (meliputi dua hal yaitu apa sumbangan kegiatan masing-masing kepada kerja jejaring dan apa kontribusi jejearing kepada kegiatan yang dilakukan di tingkat local) dan ketiga, bagaimana ke depan (meliputi apa yang perlu dilakukan terkait program pendidikan dan bagaimana kerja jejaring bisa ditingkatkan?)

Sedangkan Pertemuan Jaringan kali ini telah membahas beberapa hal penting diantaranya isu-isu strategis tahun 2013-2017. Dari pertemuan ini dirumuskan lima isu strategis yaitu 1) Memperjelas dan mengembangkan nilai-nilai teologi dan budaya yang pluralis. 2) Memperkuat Jaringan Antariman untuk melawan fundamentalisme Agama, pasar dan kekerasan negara, 3) memperkuat dan mempengaruhi publik tentang wacana pluralisme melalui media, 4) Mengontrol Negara dalam menjamin hak beragama dan berkeyakinan, dan 5) Memanfaatkan momentum politik 2014 sebagai perubahan social politik.

### **Evaluation and Reflection Interfidei Education Program and Strategic Meeting of Interfaith Network October 10-12, 2012, UC UGM**

On October 10-12, 2012 we held evaluation and reflection on Interfidei education program. It was attended by 40 institutions that have been in cooperation directly and indirectly with Interfidei. It was followed by strategic meeting of interfaith network in the next two days.

We discussed three points in evaluation and reflection. First, what we have been done related to education program of Interfidei including the activities, benefits, advantages and barriers. Second, what will be contributed to the network including contribution of institution to the network and contribution of the network to local activities. Third, next step include what need to be done on education program and improving the networks work.

In strategic meeting we discussed some strategic issues from 2013 to 2017 and defined five strategic issues such as emphasizing and improving the pluralist theology and cultural values; strengthening Interfaith Network against religious fundamentalism, market and state violence; strengthening and influencing public on pluralism in the media; controlling the





Setelah berhasil merumuskan isu-isu strategis di atas, peserta pertemuan ini kemudian menjabarkannya dengan lebih detail meliputi: langkah-langkah strategis, program-program, kegiatan-kegiatan dan target program serta pembagian kerja dari masing-masing lembaga. \*

state on keeping freedom of religion and belief; using the 2004 political momentum as political social change

After defining the strategic issues, the participants translated them in detail include strategic steps, programs, activities and strategic programs. \*

### **Kuliah Umum: 'Holocaust, Hak-hak Minoritas dan Problem Multikulturalisme'**

bersama Racelle Weiman, Ph.D

Interfidei bekerjasama dengan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM dan Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm) UIN Sunan Kalijaga, menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tema 'Holocaust, Hak-hak Minoritas dan Problem Multikulturalisme' pada 3 Desember 2012. Kuliah yang dilaksanakan di Lt 3 Gedung Pascasarjana UGM ini menghadirkan Racelle Weiman, Ph.D, Direktur Global Education and Professional Training pada Dialogue Institute, USA.

Racelle mengawali paparannya dengan menyatakan bahwa realitas kepelbagaian yang ada pada manusia merupakan salah satu cara Tuhan 'mencintai kita'. Bahkan Tuhan memberikan keunikan tidak hanya kepada setiap individu manusia, tetapi bahkan kepada binatang sekalipun. Dia mencontohkan tidak ada satupun Zebra yang strip-nya sama, seperti sidik jari, ia pasti berbeda dari yang lain. Sehingga dalam masyarakat pluralistik kita harus mau belajar dari keunikan yang lain.

Menurutnya umat Yahudi percaya pada satu tuhan karena ia merupakan bagian dari Agama-agama Ibrahim. Umat Yahudi sudah belajar banyak dari pengalaman penderitaan, tekanan dan diskriminasi sebagai kaum minoritas selama berabad-abad, khususnya ketika zaman Nazi Jerman (holocaust). Pasca era Nazi, umat Yahudi mempunyai "kebebasan tetapi tetap tidak bebas" karena umat Yahudi tidak bisa jadi bangsa Aram, tidak bisa berpolitik, tidak bisa punya tanah atau bisa tinggal di suatu tempat tapi tidak punya hak apa-apa, tidak punya pekerjaan, tidak boleh ke sekolah dan mengakses semua informasi. Sehingga tak ada tempat untuk pergi. Racelle kemudian mengkritik istilah yang berkembang seperti Asian Jews, Black Jews, Chinese Jews, dan sebagainya yang seolah-olah menyamakan Yahudi sebagai satu "ras", padahal Yahudi itu adalah sebuah komunitas, orang-orang. Sehingga masalahnya bagaimana kita berkomunitas bersama.

Presentasi Racelle kemudian ditanggapi oleh Leo Epafra, Ph.D, yang mengkritik bahwa kebanyakan paparan tentang Yahudi, termasuk oleh Racelle terlalu menekankan bahwa "Yahudi is about suffering". Kritik tersebut langsung dibantah oleh narasumber dengan mengatakan bahwa dia bahagia menjadi seorang Yahudi, tetapi faktanya memang berat karena selalu ada miskonsepsi tentang Yahudi. \*

### **Public Lecture: Holocaust, Minority Rights and the Problem of Multiculturalism**

With Racelle Weiman, Ph.D

Interfidei in cooperation between Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM dan Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm) UIN Sunan Kalijaga held a Public Lecture "Holocaust Minority Rights and the Problem of Multiculturalism" conducted by Racelle Weiman, Ph.D, Director of Global Education and Professional Training on Dialogue Institute, USA on 3 Desember 2012 at graduate building 3rd floor of UGM.

Racelle started by saying that God loves us as human beings by giving us uniqueness. Even it can be seen on animals. She gives the example on Zebras that have different types of stripping, like fingerprints on human beings. It means in pluralistic society we must learn from the others' uniqueness.

She says that Jews only believe in one God because it part of Abrahamic religions. Jews have learnt from the suffering experiences, pressure and discrimination as minority for centuries particularly in Holocaust. In Nazi era, Jews had freedom but in the fact they had not because they could not be Arams, did not have political rights, homeless, workless, could not go to school and access some information. There is no place to go. Racelle criticized the term that has spread such as: Asian Jews, Black Jews, Chinese Jews, etc. The fact, Jews is a community that lives together.

Leo Epafra, Ph. D as a responder said that being Jews is about suffering. Racelle avoid the statement by saying she is happy being a Jews but in fact is tough because there is still misconception about Jews. \*



## REFLEKSI

Elga Sarapung

Sudah dari sononya, bangsa, yang kemudian bernama bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang warga masyarakatnya majemuk, plural, bhinneka dari banyak aspek. Bahkan, bila kita mau jujur, bangsa dan negara Indonesia ini lahir dari dinamika realitas perbedaan tersebut: agama, etnis, warna kulit, latarbelakang sosial, ideologi, dan lain sebagainya. Perbedaan yang mampu ditata oleh para pemikir, pejuang dan pendiri bangsa ini, sehingga lahirlah Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai Konstitusi berbangsa dan bernegara serta *Bhineka Tunggal Ika* dipilih dan diputuskan menjadi semboyan hidup bangsa Indonesia.

Ketiga hal penting dan mendasar tersebut, diputuskan bersama melalui sebuah proses panjang yang sungguh patut dihormati dan disyukuri. Mereka membicarakan secara terbuka, melalui sebuah dialog yang jujur, penuh dengan integritas yang kuat serta intelektualitas mendalam demi tercapainya kesepakatan bagi kepentingan semua pihak untuk kehidupan jangka panjang bangsa Indonesia. Dialog yang mencairkan semua ego kepentingan etnis, agama dan ideologi yang eksklusif, menjadi inklusif dan pluralis, yang menghargai dan mengakui kekayaan kemajemukan warga bangsa, dan memberi kesempatan kepada berbagai kekayaan kemajemukan tersebut untuk hidup dan berkembang di Negara Republik Indonesia.

Kita semua tahu, bahwa salah satu isu yang paling krusial saat itu adalah soal, apakah negara ini adalah negara agama atau bukan? Karena itu, usul dari beberapa orang untuk memasukkan “negara berdasarkan pada syariat Islam” dalam Pancasila, ditolak. Mengapa? Karena, warga masyarakat dari bangsa Indonesia ini menganut agama dan keyakinan yang plural, majemuk, bhinneka, memiliki banyak perbedaan, bukan tunggal, bukan beragama satu saja, tetapi banyak. Kenyataan itu harus dihormati, dihargai, diterima dan dihidupkan sebagai sebuah fakta, sebuah *sunatullah*. Untuk itu memerlukan mekanisme tata kelola perbedaan tersebut secara adil, realistis, agar menjadi potensi positif, konstruktif dalam membangun bangsa. Karena itulah

## REFLECTION

Elga Sarapung

Initially, the nation which then is referred to as Indonesian is a nation of plural, bhinneka (diverse) community, perceived from many aspects. Even, if we are to be honest, this Indonesian nation and country is born of the dynamics reality of these differences: religions, ethnics, skin colors, social backgrounds, ideologies, etc. It is these differences that was able to be managed by the thinkers, fighters and founding fathers of this very nation, giving birth to *Pancasila* (the Five Principles of Indonesia) as the principles of the State, UUD 1945 as the Constitution of our life in this nation and state, and *Bhineka Tunggal Ika* (Unity in Diversity) to be chosen and decided as the life motto of the Indonesian nation.

The aforementioned three important basic substances were decided together through a long process which really needs to be revered and valued. Our founding fathers discussed them openly, through an honest dialog, full of strong integrity and intellectuality in order to reach an agreement for the interest of all parties for the long-period life of Indonesian nation. It was a dialog dissolving all the ego of exclusive ethnic, religious, and ideological interests into inclusive and pluralist interests; ones appreciating and recognizing the richness of plurality of the nation, and providing opportunity to the various plurality richness to live and develop in the Republic of Indonesia.

We are all aware that one of the most crucial issues of the time was whether this state should be religious-based or not. Thus, suggestion from a number of persons to include “The state is based on Islamic Laws” in *Pancasila* was declined. Why? Because the community of this Indonesian nation adheres to plural, diverse religions and faiths, with many differences, instead of one single religion. This fact should be revered, valued, accepted, and lived as a fact, a *sunatullah*. Therefore, a just and realistic management

dipilih model tata kelola hidup berbangsa, adalah demokrasi.

Dalam perkembangannya, kemajemukan atau pluralitas agama dan keyakinan ini semakin berkembang dan jumlahnya bertambah. Dari yang sudah ada selama ini - selain 6 agama yang diakui resmi oleh Negara, juga agama-agama yang belum diakui secara resmi oleh Negara, termasuk agama-agama lokal, dan berbagai aliran agama yang ternyata sudah sejak dahulu kala, dalam beberapa generasi, hidup dan berkembang di Indonesia, seperti Ahmadiyah dan Syiah dalam agama Islam - sampai dengan aliran-aliran keagamaan yang cukup baru di Indonesia (kurang lebih 5 tahun-40 tahun terakhir), misalnya dalam agama Kristen Protestan dan Katolik, agama Hindu, Buddha, juga dalam agama Islam.

Alhasil, di Indonesia jumlah agama dan keyakinan semakin banyak, demikian juga sekte atau aliran atau denominasi di dalam setiap agama. Banyak di antara mereka, tidak lahir di dan tidak tumbuh dari Indonesia, tetapi yang “diimport” dari luar -sama seperti agama-agama yang selama ini diakui oleh Negara (Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan Khonghucu). Dalam agama Islam, warna aliran keagamaan yang sedang muncul saat ini, adalah “Wahabisme”, yang berasal dari Saudi Arabia, yang ciri-cirinya antara lain, dari segi ajaran, fundamentalis (sempit) dan eksklusif, bahkan umumnya cenderung radikal. Sementara agama Kristen (Protestan dan Katolik), yang warnanya “injili” atau kharismatik-pentakostal-yang cenderung fundamentalis (sempit) dan eksklusif, umumnya dari Amerika. Semua itu meramaikan “warna-warni” dari kebhinekaan warga masyarakat, bangsa Indonesia.

Pertanyaannya adalah, bagaimana realitas perbedaan agama dan keyakinan, dengan semua aliran dan/atau denominasi menjadi potensi positif dan konstruktif dalam membangun bangsa Indonesia secara demokratis, adil dan beradab atas dasar Pancasila dan UUD 1945? Bagaimana agar realitas perbedaan agama dan keyakinan, dengan semua aliran dan/atau denominasi bisa menjadi kekuatan bersama dari bangsa ini untuk menghidupkan suasana kehidupan warga masyarakat yang damai dengan rasa aman, tentram, adil, sejahtera, tanpa kekerasan, tanpa praktek-praktek pemaksaan untuk bertobat dan mengikuti salah satu agama (atau aliran keagamaan) saja, tanpa terjadi truth claim sempit dan eksklusif, yang menganggap agamanya yang benar dan menuduh yang lain tidak benar?

Dari kenyataan kemajemukan agama dan

mechanism is required to turn these differences into a positive and constructive potential in building this nation. It is within this line of thinking that the model for management of our nation's life is democracy.

In its journey, religious and faith plurality has developed and increased in number, from what have existed so far – in addition to the 6 religions officially recognized by the State, there are religions which have yet to be recognized by the State, including indigenous religions, and various religious denominations which have existed since a long time ago in a number of generations, living and developing in Indonesia, such as *Ahmadiyah* and *Syiah* in Islam – to quite new denominations in Indonesia (in the last 5 – 40 years), for example in Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Islam.

As a consequence, the number of religions and faiths in Indonesia increases, as does the number of sects or denominations in every religion. Many of these were not born and developed in Indonesia, but “imported” from abroad – the same as the religions officially recognized by the State thus far (Islam, Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hinduism and Confucianism). In Islam, the color of the up-and-rising denomination right now is “*Wahabism*”, originating from Saudi Arabia, which characteristics are among others, from the teaching point of view, fundamentalist (shallow) and exclusive, even tend to be radical in general. Whereas in Christianity (Protestantism and Catholicism), the colors are “evangelical” or charismatic -pentacostal which tends to be of fundamentalist (shallow) and exclusive nature, commonly from the US. All the above add to the “colors” of the diversity of members of the community, nation of Indonesia.

The question remains: how could the reality of religious and faith differences, with all its denominations, become a positive and constructive potential in building Indonesian nation in a democratic, just, and civilized way based on *Pancasila* and UUD 1945? How could these religious and faith differences, with all their denominations, be a collective strength of this nation to create a peaceful life situation of community members with safe, just, prosperous, non-violent feelings without any coercion practices to others to repent and convert to any specific



keyakinan yang berkembang sekarang, lebih memperjelas kepada kita bahwa agama, bukanlah sesuatu yang turun dari langit, tetapi lahir dari bentukan manusia-manusia yang terinspirasi, terilhamkan, entah oleh yang dinamakan “wahyu”, atau “sesuatu yang ilahi”, yang kemudian diorganisir dan diberi kelengkapan, melembaga dan diikuti oleh banyak orang. Bentuk itu terjadi dalam satu konteks peristiwa tertentu, bahkan boleh jadi berasal dari keyakinan dengan spiritualitas yang dimiliki oleh suku/etnis tertentu.

Secara mendasar, kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan sebuah agama sangat ditentukan oleh faktor konteks, kapan, di mana dan mengapa dia lahir dan bagaimana dia lahir serta bagaimana perkembangannya? Mengapa seseorang memeluk agama tersebut? Aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi perkembangannya? Karena itu, agama cukup rentan dengan pengaruh dari kenyataan perubahan sosial-budaya-politik-ekonomi dari konteks, di mana dia berada, karena para penganutnya adalah orang-orang yang hidup dan berkembang dalam konteks tertentu, termasuk konteks global.

Dengan demikian perbedaan-perbedaan tersebut, selain semakin bervariasi, juga semakin nampak. Masing-masing ingin memperlihatkan diri, identitas, bahkan, sekarang ini cenderung semakin ego dan eksklusif. Sebab itu, perlu dijembatani; perlu dibukakan “ruang” bersama yang tepat, di mana perbedaan-perbedaan perlu dibicarakan, didialogkan bersama secara terbuka, jujur, untuk pemahaman bersama yang baik antara satu terhadap yang lain, baik perspektif tentang sesuatu realitas atau masalah, maupun soal-soal menyangkut perbedaan ritual, simbol, teologi.

Dialog menjadi sebuah kebutuhan mendasar di dalam setiap kenyataan yang berbeda. Tanpa dialog dan tanpa membuka diri kepada dialog, maka sebenarnya perbedaan itu akan sulit menjadi potensi bersama yang baik dan positif, apalagi dalam kerangka hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Perbedaan hanya akan menjadi “tanah” yang dapat menumbuhkan dan menghidupkan berbagai prasangka, stereotype, stigma, antara yang satu terhadap yang lain, yang menyuburkan potensi konflik. Dialog yang dimaksudkan, tidak saja sekedar duduk

religion (or denomination), without a shallow and exclusive *truth claim* deeming one's own religion to be the true one, and accusing others as untrue?

The reality of religions and faiths currently developing show us more clearly that religion is not something descended from heaven, but born of the creation of human beings inspired by something called “revelation”, or “something divine”, which is then organized and equipped, institutionalized and then followed by many. This creation takes place within one specific context of event, even could probably originate from the belief of a spirituality of a certain tribe/ethnicity.

Fundamentally, the birth, growth, and development of a religion is strongly determined by the context factor: when, where, and how these religions were delivered and how they develop: Why does one follow his/her religion? What aspects affect its development?

Therefore, religions are quite vulnerable to the impacts of social-cultural-political-economic

changes of its context: where it exists, because its adherents are human beings living and developing in a certain context, including the global one.

Thus, these differences, in addition to becoming more varied, are also more distinctive. Each religion competes to show itself, its identity, and even currently tends to be more selfish and exclusive. Therefore, they need to be bridged; need an appropriate collective “area” to be opened, within which differences are essential to be discussed together in an open, honest manner for a good mutual understanding towards one another, whether in the perspective of a reality or problems, or other issues on differences in rituals, symbols, or theology.

Dialog becomes a basic need in every reality of differences. Without dialog and without opening one's self to a dialog, it would be difficult for these differences to be a good and positive collective potential, moreover

**Dialog menjadi sebuah kebutuhan mendasar di dalam setiap kenyataan yang berbeda. Tanpa dialog dan tanpa membuka diri kepada dialog, maka sebenarnya perbedaan itu akan sulit menjadi potensi bersama yang baik dan positif, apalagi dalam kerangka hidup bersama sebagai sebuah bangsa.**



bersama dan bercakap-cakap, tetapi perlu membongkar berbagai prasangka, mencairkan berbagai kecurigaan dan kecemburuan, sampai kepada aksi konkrit bersama untuk kemanusiaan. Juga, bukan hanya pada hal-hal yang (sudah) sama, tetapi penting sekali menyentuh pada perbedaan-perbedaan, yang prinsipil sekalipun, yaitu teologi atau hal-hal terkait dengan ajaran-ajaran keagamaan. Dialog dalam soal teologis, tidak dimaksudkan untuk diperdebatkan dan dipertentangkan, melainkan untuk saling mendengar, saling belajar, saling memperjelas “identitas” masing-masing, yang kemudian memperkaya masing-masing pihak untuk membangun sikap saling menghormati dan menghargai. Dialog, yang memperkuat relasi pertemanan, persahabatan bahkan kekeluargaan. Dialog yang akan melatih semua pihak untuk mampu keluar dari ego dan eksklusifitas keagamaan dan masuk ke dalam “ruang bersama” tanpa mengaburkan apalagi menghilangkan identitas keagamaan dan keyakinan masing-masing”. Dialog yang dapat memberi jalan keluar bersama bagi agama-agama dan keyakinan untuk mengatasi persoalan di masyarakat, persoalan bangsa dan kebangsaan.

Dapat dimengerti bahwa, masih banyak di antara kita yang sangsi dengan dialog, bahkan curiga. Karena, dialog dianggap dapat “melunturkan” atau membuat “keberagamaan” seseorang menjadi kabur, abu-abu. Atau, dianggap sebagai cara dari agama tertentu untuk membuat orang yang menganut agama lain pindah agama. Dari pengalaman Interfidei selama ini, soal ini paling kuat muncul di kalangan mereka yang beragama Islam terhadap agama Kristen (Protestan dan Katolik) atau sebaliknya, juga di dalam intra agama Kristen Protestan. Demikian halnya dengan dialog dalam soal-soal teologi. Orang takut, bahkan sebaiknya menghindar dari dialog teologi. Mengapa? Pertama, karena belum memiliki pengalaman berdialog, apalagi tentang perbedaan antar dan intra agama dan keyakinan, atau tentang perspektif agama-agama terhadap sebuah realitas atau persoalan di masyarakat, atau persoalan bangsa. Kedua, karena soal teologi dianggap sangat sensitif dan dapat menimbulkan ketersinggungan, kemarahan. Ketiga, karena teologi dianggap sebagai soal privat yang tidak bisa disentuh. Keempat, karena dialog yang dibangun, sering menjadi media, di mana kepentingan politik pun berpengaruh dan menjadi prioritas dan dominan. Ini terjadi di kalangan semua agama. Kelima, karena budaya masing-masing orang, dari konteks di mana ia hidup dan berkembang tidak

in the living framework of a nation. Differences would instead be the “land” growing and nurturing various prejudices, stereotypes, and stigmas between one another, which only fertilizes conflict potentials. The dialog intended does not merely mean for the individuals engaged to be sitting down and discussing, but also dismantling of various prejudices, dissolving of suspicions and jealousies, all the way to collective concrete actions for humanity. Likewise, it does not involve only (issues that are already) similar, but also touch differences, even principal ones, which is the theology or other issues related to religious teachings. Dialog in theology does not mean that one's theology has to be debated and put against each other, but for the individuals engaged to listen to each other, learn from one another, and make clear of each other's “identity”, which would enrich the parties to construct mutual respect and appreciation. It is a Dialog which strengthens acquaintanceship, friendship, and even familial relationships. The Dialog will put all parties to exercise stepping out of their selfishness and religious exclusivity into a “collective room” without clouding, moreover losing their religious and faith identity. It could provide a way out for religions and faiths to overcome issues in the community; issues of this nation and nationality.

It is understandable that there are many who still doubt, even harbor suspicion, to dialog, as it is deemed to be able to “wash off” or turn one's “diversity” into something imprecise, greyish. In other words, dialog is viewed as a means used by one specific religion to convert others. From Interfidei's experience to date, the strongest indication could be perceived in the Moslem circle towards Christians (Protestant and Catholic) or vice versa, and within the Christian circle itself. The same applies to dialog in theological issues. People fear, even think it would be best to stay away from theological dialog. Why? First, because most still yet to have any experience in having a dialog, moreover on inter and intra religion or faith differences, or on the perspective of religions towards a reality or issue in a community or in a nation. Second, theological issues are deemed highly sensitive and could cause offence or anger. Third, theology is considered as an untouchable, private matter. Forth, the dialog built often serves as a media where politic is influential, prioritized, and dominant. This occurs in all circles of religion. Fifth, it is

memiliki budaya “dialog”.

Padahal, dialog merupakan cara yang dewasa untuk menghadapi perbedaan dan menyelesaikan persoalan karena perbedaan, atau menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi-budaya, politik secara bersama-sama dari perspektif entitas yang berbeda. Sebab itu, sekali lagi, tidak perlu takut untuk membangun dan mengembangkan dialog, bahkan tidak perlu takut untuk masuk ke dalam ruang dialog teologi. Yang diperlukan adalah, mengatur mekanisme dan proses dialog dengan jelas. Karena, dengan menyentuh soal itu, maka pada dasarnya kita sedang belajar bersama untuk memperteguh keyakinan iman kita masing-masing, tanpa harus terjebak kepada membenar-salahkan aspek-aspek ajaran agama, tetapi mencari makna terdalam dari masing-masing agama dan keyakinan, yang dapat menjadi kekuatan bersama untuk semua. Karena itu, faktor “bersedia untuk mendengar” menjadi sangat penting dalam berdialog, tidak hanya untuk didengar.

Sebab itu, kita perlu menghidupkan dan mengembangkan dialog intra-agama dan antar-agama (antar-umat beragama), antar agama dan berbagai

keyakinan, atau lebih tepat dialog antariman. Dengan istilah tersebut bahkan lebih luas melibatkan semua unsur masyarakat beragama dan berkeyakinan apa pun, termasuk yang mengaku tidak beragama. Semua orang beriman, meski tidak semua orang beragama. Iman merupakan “the inner side” dari agama. Tanpa iman, sesungguhnya agama tidak memiliki arti apa-apa; tetapi hanya sebagai sebuah “institusionalisasi keyakinan” yang disebut agama, yang ritualitas dan ajaran-ajarannya patut dijalankan. Tanpa iman, pada dasarnya agama sama saja dengan kehidupan tanpa “semangat”. Dialog antariman (“intra dan antar”) menjadi sangat penting untuk dibangun, tanpa harus menunggu terjadinya ketegangan atau konflik antara yang satu dengan yang lain, karena perbedaan.

Persoalan bagi kita di Indonesia adalah, kenyataan perbedaan ini, “intra dan antar” belum tertata dengan baik. Selain ada faktor ketidakadilan, juga diskriminasi atas dasar “mayoritas dan minoritas”. Dalam keadaan

due to one's tradition, from which context s/he lives and develops, which has no “dialog” culture.

Nevertheless, dialog is a mature approach to face differences and solve issues due to differences, or solve social-economic-cultural, and political issues collectively from the perspectives of different entities. Thus, once again, there is no need for one to be afraid to build and develop a dialog, even to enter to the area of theological dialog. All we need is the clear managing of mechanism and dialog process. This is because by touching the issue, basically we are learning together to strengthen our faith without having to be trapped in correcting or faulting the aspects of religious teachings, but instead seeking the most profound meaning of each religion and faith, to be a collective strength for all. Therefore, the factor of “willing to listen” is vital in having a dialog, instead of only wanting to be listened.

In view of the above, we need to bring into life and

**Sebab itu, kita perlu menghidupkan dan mengembangkan dialog intra-agama dan antar-agama (antar-umat beragama), antar agama dan berbagai keyakinan, atau lebih tepat dialog antariman. Dengan istilah tersebut bahkan lebih luas melibatkan semua unsur masyarakat beragama dan berkeyakinan apa pun, termasuk yang mengaku tidak beragama.**

develop intra-religious and inter-religious (inter-religious congregation) dialogs, dialogs between religions and faiths, or more appropriately,

interfaith dialogs. The latest term even engages more widely all elements of community of any religion or faith, including those claiming to having no religion. All people have faith, although not all have religion. Faith is the “the inner side” of religion. Without faith, religion actually has no meaning; it will only be an “institutionalization of faith” referred to as religion, which rituals and teachings are worthy to be implemented. Without faith, basically religion is the same as a life without “spirit”. Interfaith dialog (“intra and inter”) is vital to be built, without having to wait for any difference-caused tension or conflict to occur.

The issue for us in Indonesia remains that this reality of “intra and inter” religious differences have not been managed well. In addition to injustice factor, there is also discrimination based on “majority and minority”. In such a condition, an honest, open, and humble dialog have yet to take place. What exist are dialogs of

seperti ini, dialog yang jujur, terbuka, dan bersahaja pun belum terjadi. Yang ada, lebih kepada dialog yang sifat dan bentuknya elitis, kaku. Contohnya untuk beberapa kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang terjadi adalah – atas nama dialog – pertemuan antara penguasa dan korban, yang didalamnya ada agenda “pemaksaan” secara langsung dan tidak langsung kepada korban untuk melakukan pertobatan, karena aliran keagamaan mereka dianggap atau dituduh sesat. Jangan heran, kenyataan perbedaan “intra dan antar” agama dan keyakinan semakin keruh, tegang dan memprihatinkan. Keadaan ini membuat toleransi dan kerukunan yang sudah terbangun di masyarakat menjadi rusak.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya ketidakadilan, diskriminasi hak-hak warga negara di sini: pertama, semakin menguatnya pemikiran dan sikap keagamaan yang fundamentalis sempit dan radikal di kalangan kelompok-kelompok keagamaan atau aliran keagamaan tertentu yang memaksa Negara terjebak kepada sikap tidak adil. Kedua, karena faktor politik; selain terjadi politisasi agama serta “agamisasi politik”, juga dari segi nilai-nilai, keberagaman seseorang nyaris tidak berhasil memberi pengaruh apa-apa kepada dinamika politik di Indonesia, karena para politisi, pemerintah (eksekutif, yudikatif, legislatif) yang notabene mengaku beragama ternyata tidak bisa diharapkan menjadi agen-agen pembawa nilai-nilai keagamaan.

Pertanyaan kepada kita semua adalah, apakah kita pernah bertanya kepada diri kita masing-masing, hal positif apa yang sudah kita kembangkan dari perbedaan intra dan antar-umat beragama? Apakah perbedaan agama dan keyakinan akan kita jadikan sebagai kekuatan positif dan konstruktif atau kita akan membuat perbedaan menjadi kekuatan negatif dan destruktif? Bagaimana mengembangkan pemikiran positif terhadap fakta perbedaan melalui dialog, baik dalam hal wacana, perspektif, teologi, maupun praksis-sosial?

Sebagai pesan reflektif kepada semua pembaca. Jangan takut pada kenyataan perbedaan agama dan keyakinan, jangan menghindar atau menolak perbedaan, jangan menyeragamkan dan memaksakan perbedaan dalam agama dan keyakinan dengan berbagai alirannya menjadi satu kesatuan yang kaku, statis. Jangan memakai realitas perbedaan untuk kepentingan politik sesaat yang mengakibatkan ketidakadilan merajalela. Jadikanlah perbedaan sebagai kekuatan bersama untuk saling menghidupkan, saling memberi energi positif, baik dalam pikiran, perasaan maupun sikap hidup demi kehidupan damai bagi semua orang. ★

elite, rigid nature. Take as example some cases of freedom of religion and faith: what happens is – in the name of dialog – a meeting between the authority and the victims, in which there is an agenda of direct and indirect “coercion” to the victims to repent, as their denomination is deemed or accused of being a heresy. No surprise, as the reality is that “intra and inter” religion and faith differences are becoming more muddy, tensed, and disquieting. Such a situation damages tolerance and harmony already built in the midst of the community.

There are a number of factors bringing about injustice and discrimination against the rights of citizens here: first, the strengthening of shallow and radical fundamentalist thinking and attitude of religiosity in the midst of specific religious congregations or denominations, pushing the State into the trap of an unjust attitude. Second, there is the political factor; in addition to occurrence of religion politicization and “politic religionization”, from the perspective of values, one's diversity could barely affect the dynamics of politic in Indonesia, as politicians, government (the executive, judicative, and legislative) who nota bene confess that they adhere to a religion cannot be expected to be agents upholding the values of religiosity.

The question for us all remains whether we have asked ourselves what positive matters we have cultivated from intra and inter congregational differences. Will we turn religious and faith differences into a positive and constructive strength, or will we turn them into a negative and destructive strength? How do we nurture a positive thinking towards this fact of differences by means of dialog, whether in discourse, perspective, theological, or practical-social matters?

A reflective note to all readers: Do not fear religious and faith differences, do not elude or decline differences, do not generalize and force differences in religions and faiths with all their denominations into one rigid, static unity. Do not use the reality of differences for temporary political interests resulting in rampant injustice. Turn differences into a collective strength to bring each other into life and give each other positive energy, whether in thoughts, feelings, or ways of living for a peaceful life for all. ★

**AGENDA****Program Januari-Juni 2013:**

1. Sekolah Lintas Iman ke-4, 16 Februari-2 Juni 2013
2. Diskusi Film “Mata Tertutup”, 4 Februari 2013, di Auditorium UKDW, Yogyakarta
3. Peluncuran dan Diskusi Buku “Beyond Pluralism: Open Integrity As A Suitable Approach To Muslim-Christian Dialogue”, 7 Maret 2013, di Covention Hall UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
4. Kunjungan Guru-guru Agama Se-DIY ke Seminari Mertoyudan, Pondok Pesantren Pabelan dan Vihara Mendut pada 28 April 2013.
5. Pertemuan Besar Guru-guru Agama Se-DIY, April 2013
6. Kursus/Studi Agama-agama dan Hak-Hak Asasi Manusia (Juni-Juli 2013)
7. Pertemuan Para Pimpinan Agama-Agama se-Indonesia (Mei/Juni 2013)
8. Pelatihan untuk Anggota DPR (masih rencana)
9. Penerbitan 4 (empat) buku dan 1 Newsletter
10. Pertemuan lanjutan Jaringan Antariman Indonesia per wilayah (Juni-Juli 2013)

**AGENDA****Programs for January-June 2013:**

1. Fourth Interfaith School, February 16<sup>th</sup> – June 2nd 2013
2. Movie Screening and Discussion “Mata Tertutup” (Closed Eyes), February 4, 2013, at Auditorium of Duta Wacana Christian University.
3. Book Launch of “Beyond Pluralism: Open Integrity As A Suitable Approach To Muslim-Christian Dialogue”, By Sr. Gerardette Philips, RSCJ, Ph.D , on March 7<sup>th</sup> 2013 at Convention Hall, State Islamic University Sunan Kalijaga
4. The Excursion of Religious Teachers of Yogyakarta to Seminari Mertoyudan, Pabelan Islamic Boarding School and Vihara Mendut, on April 28, 2013.
5. The Big Gathering for the Religious Teacher of Yogyakarta on April 2013
6. Religious and Human Rights Courses, Juny/July 2013
7. Meeting of Religious Leaders of Indonesia, May/June 2013
8. Training for the member of the House of Representatives (on the planning)
9. Publication of 4 books and 1 newsletter
10. Meeting of Indonesian Interfaith Network by region, June- July 2013

**Yayasan Dian/Interfidei**  
**Dian/Interfidei Foundation**

<b>Board Members</b>	: Djohan Effendi, Daniel Dhakidae
<b>Executive Board</b>	: Elga Sarapung (Director), Margareta Endah Widyaningrum (Secretariate), Eko Putro Mardianto (Finance)
<b>Departements</b>	: Elga Sarapung (Education, Networking), Wiwin Siti Aminah (Documentation, Website & Database), Sarnuji (Publication, Library), Fita Andriani (Institution, Fundrising, HRD)
<b>Address</b>	: Jl. Banteng Utama 59, Perum. Banteng Baru Yogyakarta, 55581-Indonesia Ph.: 0274-880149, Fax.: 0274-887864, E-mail: dianinterfidei@yahoo.com. Website: <a href="http://www.interfidei.or.id">http://www.interfidei.or.id</a>
<b>No.Rek</b>	: Yayasan DIAN-Interfidei, Bank BNI Cabang UGM, Capem Pasar Colombo, No. 0039234672.

**Demi Pengembangan Newsletter ini, kami terbuka terhadap saran dan kritik anda.**  
*For the development of this Newsletter, we open to your suggestions and critics.*